



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.786, 2014

BAPPENAS. Rencana Strategis. Tahun 2010-2014. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2010 - 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan organisasi Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu mengubah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
 7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;

8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K-L) 2010 - 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010-2014.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran dan Anak Lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Anak Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 12 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 1
TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TAHUN 2010 - 2014

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2005-2009, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat pusat dan daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional, dan Rencana Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2010-2014, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2014, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2010-2014.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Kementerian PPN/Bappenas harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 yaitu “Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2010-2014.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan nasional, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”. Peran dan tugas Kementerian PPN/Bappenas di atas adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya

integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Kementerian PPN/Bappenas harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Perpres Nomor 47 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas adalah merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, yaitu: 1) penyusunan rencana pembangunan nasional; 2) koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional; 3) pengkajian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 4) penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan; 5) koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait; 6) koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas; 7) fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 8) penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden; serta 9) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Mengacu pada landasan di atas, pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) pengambil kebijakan/keputusan (*policy maker*), (2) koordinator, (3) *think-tank*, dan (4) *administrator*. Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Sebagai **pengambil kebijakan/keputusan**, Kementerian PPN/Bappenas menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan nasional baik jangka panjang (RPJPN), menengah (RPJMN) maupun tahunan (RKP). Untuk rencana kerja pemerintah (RKP) yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPJMN dimulai sejak RPJMN 2010-2014. Selain tugas perencanaan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan dalam turut menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak

dan berskala besar, seperti penanganan pasca bencana alam dan perubahan iklim (*climate change*).

Sebagai **think tank**, Kementerian PPN/Bappenas melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan nasional maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Sebagai **koordinator**, Kementerian PPN/Bappenas antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah seperti penanganan pasca bencana yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain; koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan; koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, dan pengalokasian dana untuk pembangunan bersama Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait; serta koordinasi kegiatan strategis sesuai penugasan.

Kemudian, kegiatan sebagai **administrator**, antara lain pengelolaan dokumen perencanaan termasuk pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN); penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi; serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Tabel 1 PERAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL			
Pengambil Keputusan (<i>policy/decision maker</i>)	<i>Think Tank</i>	Koordinator	<i>Administrator</i>
<p>PENJABARAN :</p> <p>1. Perencanaan: penyusunan rencana pembangunan nasional jangka panjang, menengah, pendek/ tahunan.</p> <p>2. Penganggaran: penyusunan alokasi pen-danaan (indikatif) sebagai bahan penyusunan RAPBN bersama dengan Depkeu.</p>	<p>PENJABARAN :</p> <p>1. Pengkajian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, dan kebijakan lainnya.</p> <p>2. Fasilitasi pembinaan instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah.</p> <p>3. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.</p>	<p>PENJABARAN :</p> <p>1. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta peng-alokasian dana pembangunan bersama K/L terkait.</p>	<p>PENJABARAN :</p> <p>1. Pengelolaan dokumen perencanaan termasuk pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN).</p> <p>2. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.</p> <p>3. Penyusunan dan</p>

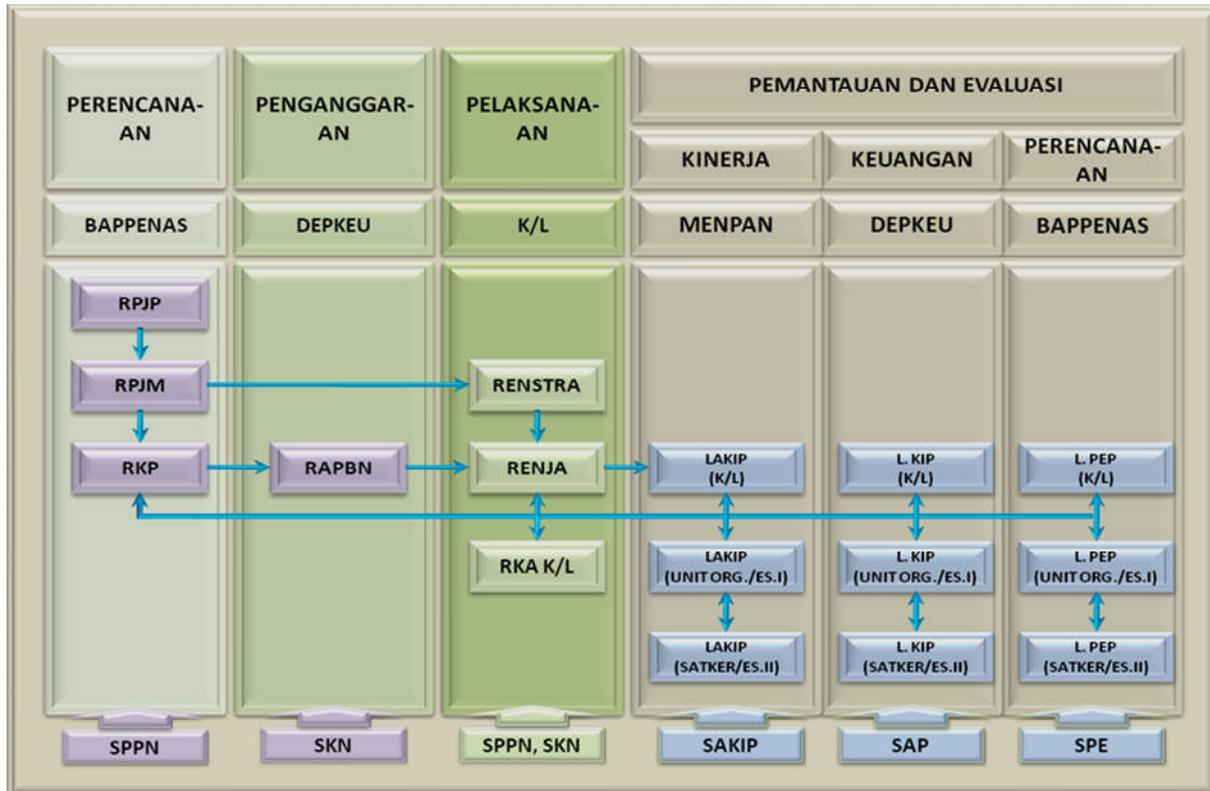
<p>3. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.</p> <p>4. Pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan.</p>		<p>3. Koordinasi kegiatan strategis penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan.</p>	<p>pengelolaan laporan hasil evaluasi.</p> <p>4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.</p>
--	--	--	---

Selama periode 2004-2009, pelaksanaan keempat peran tersebut telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan (RPJPN, RPJMN, RKP, RPJMD, RKPD) dengan pelaksanaannya baik di pusat maupun daerah. Terkait dengan munculnya berbagai masalah baru dan mendesak, seperti penanganan bencana

alam, penanggulangan kemiskinan, penanganan terhadap dampak pemanasan global, dan antisipasi terhadap fluktuasi harga bahan bakar minyak, yang mempengaruhi beban subsidi pemerintah, Kementerian PPN/Bappenas dituntut untuk antisipatif dan proaktif serta mampu mengembangkan sistem pendeteksian dini (*early warning system*) sehingga pencapaian tujuan pembangunan nasional tetap terjamin.

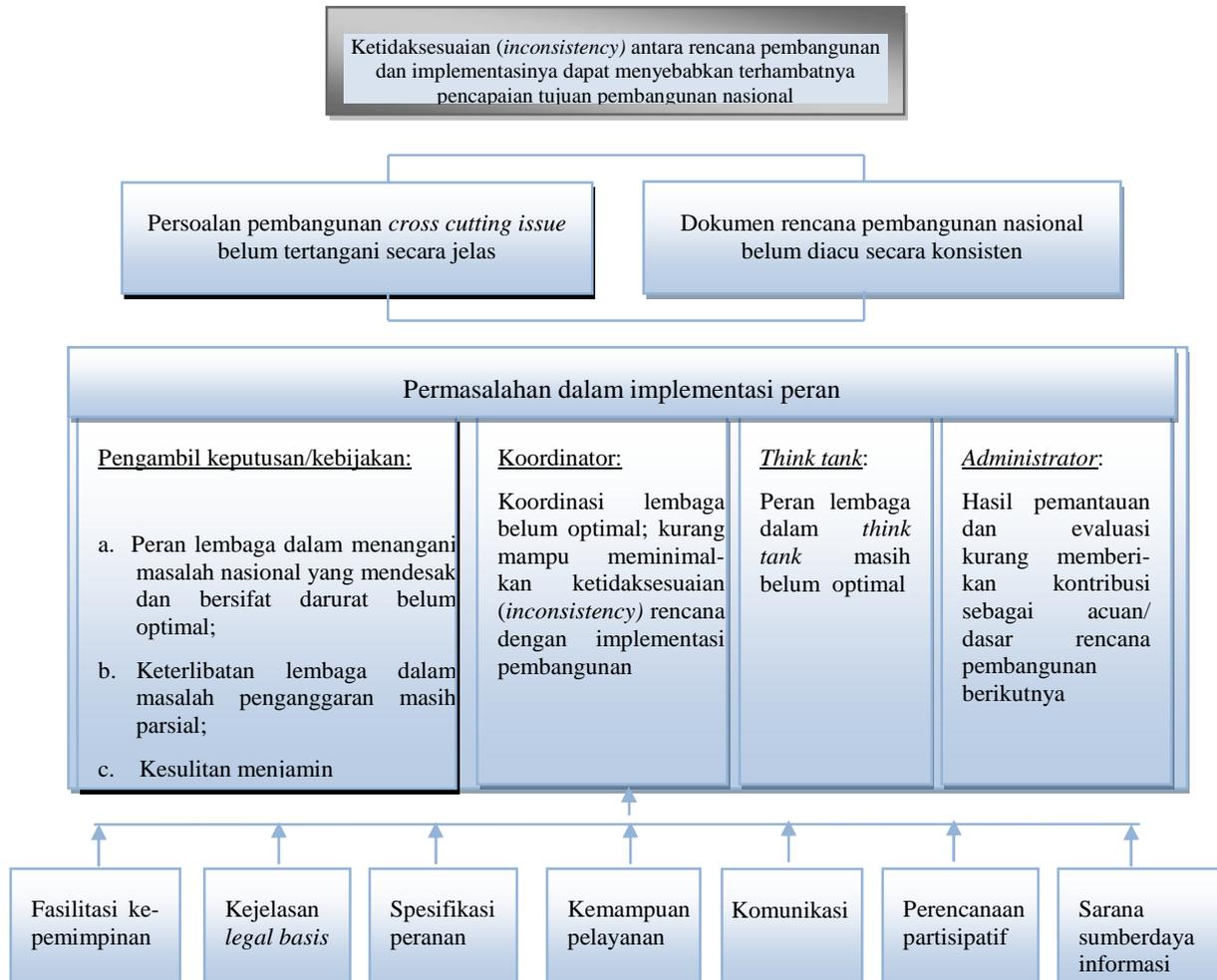
Dalam pelaksanaan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *think tank*, optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Salah satu masalah strategis yang harus juga diselesaikan Kementerian PPN/Bappenas terutama sebagai *think tank* adalah membangun dan mengintegrasikan sistem manajemen pembangunan yang selama ini melibatkan berbagai instansi, perguruan tinggi dan organisasi profesi, diatur dengan kebijakan atau peraturan yang belum terintegrasi dengan baik, sebagaimana tampak dalam Diagram 1.

Diagram 1
SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN



Di samping itu, terus dilakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan semakin mendekatnya antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan penganggaran. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta belum optimalnya mekanisme *reward and punishment*. Masih terdapat ketidaksiharasan antara rencana pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana terlihat dalam Diagram 2.

Diagram 2:
Keterkaitan Kondisi saat ini dan Dampaknya



Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses pembangunan nasional secara baik, antara lain dengan mengawal dan memperkuat sistem manajemen pembangunan yang solid. Kementerian PPN/Bappenas harus semakin mampu menjadi fasilitator dalam mengarahkan proses pembangunan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan dinamika heterogenitas sumber daya, persepsi, dan kepentingan sektoral dan kedaerahan. Keberhasilan dalam memfasilitasi dan mempertemukan komitmen para pemangku kepentingan akan semakin meningkatkan kinerja institusi dan sekaligus memantapkan keberadaannya. Untuk menjadi fasilitator yang efektif, Kementerian PPN/Bappenas perlu terus melakukan perbaikan, dan mengembangkan tradisi yang kondusif bagi berkembangnya individu dan kelompok pembelajar menuju organisasi pembelajar (*organizational learning*). Di

samping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, dan keterkaitan (interrelasi) antarbudaya dan negara, menuntut Kementerian PPN/Bappenas untuk dapat melakukan evaluasi dan mengadaptasinya dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Kementerian PPN/Bappenas. Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap Kementerian PPN/Bappenas.

a. Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan rencana pembangunan nasional, sebagai bagian dari Sistem Manajemen Pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional (Tabel 2). Sistem manajemen pembangunan dibangun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Sistem perencanaan mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang merupakan turunan UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 8/2008 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang merupakan turunan UU Nomor 32 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra K/L 2010-2014.
- 2) Sistem penganggaran mengacu kepada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta peraturan pelaksanaannya, antara lain: PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 59

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah turunan dari UU Nomor 33 Tahun 2004.

- 3) Sistem pelaksanaan mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan pelaksanaannya, di antaranya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012.
- 4) Sistem pelaporan mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berbagai peraturan yang bersifat pelaksanaan antara lain PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Sumber Daya Manusia Perencana

Di samping masalah peraturan perundang-undangan tersebut, juga terdapat masalah lain, yaitu terbatasnya sumberdaya manusia perencana pembangunan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, instansi-instansi tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas secara memadai. Tabel 2 memberi gambaran potensi, permasalahan dan dampak dari peraturan perundang-undangan dan sumber daya manusia aparatur di bidang perencanaan pembangunan.

Tabel 2 IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS SERTA TINDAK LANJUT TERHADAP PERAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS		
LINGKUNGAN STRATEGIS EKSTERNAL NASIONAL: PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SDM PERENCANA		
POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa peraturan perundang-undangan mengamankan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah 2. Kuantitas SDM aparatur tingkat pusat/daerah cukup memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan. 2. Perubahan lingkungan strategis. 3. Belum memadainya kompetensi perencana di tingkat pusat dan daerah. 4. Belum optimalnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi dalam memberikan kontribusi pada kualitas SDM aparatur negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerjasama antarlembaga perencanaan baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencanaan, me-mantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan. 2. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas. 3. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. 4. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan. 5. Peningkatan kompetensi SDM aparatur perencana di tingkat pusat dan daerah melalui diklat, bimbingan teknis, focus group discussion, seminar kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah.

c. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan di era reformasi disadari masih menimbulkan penafsiran yang beragam sehingga terkesan menciptakan kondisi yang kurang dapat dikendalikan. Masih ada kecenderungan sebagian pemerintah daerah yang menafsirkan bahwa mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengurus rumah tangganya tanpa memerhatikan hubungan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah memunculkan fenomena yang sebelumnya tidak terpikirkan. Misalnya beberapa kasus konflik antardaerah dalam melakukan eksplorasi dan pengelolaan sumberdaya alam, merenggangnya hubungan antarkelompok karena masalah-masalah geografis wilayah sehingga menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti ketidakamanan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah belum sepenuhnya disikapi sebagai peluang untuk melakukan sinergi dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam arti luas, tetapi cenderung lebih dimaknai sebagai upaya

menyejahterakan masyarakat daerahnya sendiri. Dalam konteks ini, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat didasari dengan pemahaman yang tidak tepat, sehingga menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antardaerah.

Ada beberapa dampak dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. **Pertama**, kebijakan desentralisasi dan otonomi mendorong terjadinya pemekaran daerah yang cenderung menimbulkan masalah baru bagi daerah yang bersangkutan, seperti konflik antardaerah dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam, dan keberlanjutan pembangunan di daerah-daerah pemekaran. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu ketidaksiapan pemerintah daerah yang baru untuk melakukan akselerasi pembangunan dikarenakan keterbatasan sumber daya alam, sarana dan prasarana, serta sumber daya aparatur. Akibatnya, terjadi kesenjangan kesejahteraan antara daerah induk dengan daerah hasil pemekaran. Cepat atau lambat, kondisi ini turut mendorong peningkatan jumlah masyarakat miskin di daerah tersebut.

Kedua, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah cenderung menimbulkan potensi konflik komunal, yang terjadi pada suatu komunitas dengan karakteristik sosio budaya yang berbeda. Fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki laut yang luas dengan beragam suku dan budaya, tidaklah dapat disangkal. Keragaman geografis, suku, budaya, dan agama atau keyakinan memunculkan karakteristik personal atau komunitas yang berbeda. Selama masa Orde Baru, komunikasi yang terbangun adalah komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah tampak jelas dalam program-program pembangunan. Secara faktual kondisi ini kurang menguntungkan bagi upaya pengembangan saling pengertian antar suku dan kelompok masyarakat tentang keragaman suku dan heterogenitas di Indonesia. Fenomena konflik komunal seperti yang terjadi di beberapa daerah dalam sepuluh tahun terakhir dapat menjadi bukti konsekuensi kekurangberhasilan akulturasi ini. Di samping itu terdapat faktor-faktor lain seperti kekurangpedulian elit politik, perilaku korup dan mementingkan kelompok atau golongan sendiri, yang telah memberikan pengaruh sangat kuat bagi terbentuknya ketidakpercayaan antarelemen masyarakat. Ketidakpercayaan tersebut merupakan kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan dapat menjadi penghambat bagi kelancaran proses pembangunan dan pencapaian tujuan nasional.

Ketiga, dampak lainnya adalah jumlah penduduk yang bertambah, semakin merosotnya mutu lingkungan dan sumberdaya alam serta fenomena bencana alam yang terjadi berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir ini. Meningkatnya jumlah penduduk akibat pemerintah daerah kurang tanggap terhadap masalah keluarga berencana, menuntut penyediaan berbagai kebutuhan pokok, termasuk pangan. Apabila kegiatan ekonomi terus terpusat di Jawa, maka ketersediaan lahan subur akan semakin berkurang. Lahan

pertanian yang subur di Jawa secara cepat akan beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian. Konversi lahan akan menurunkan kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi di lahan produksi yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya produktivitas hasil pertanian.

Wawasan lingkungan belum dihayati secara penuh. Aktivitas peralihan fungsi kawasan hutan menjadi pemukiman, perkebunan, persawahan, pertambangan, perindustrian, pertambangan; dan masalah kebakaran hutan, serta makin meningkatnya pembalakan liar (*illegal logging*) mengakibatkan deforestasi atau berkurangnya kawasan hutan, perubahan iklim serta terganggunya kondisi tata air. Gejala kerusakan tata air terlihat dari berkurangnya ketersediaan air tanah terutama di daerah perkotaan, turunnya debit air waduk dan sungai pada musim kemarau yang mengancam pasokan air untuk pertanian dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga air (PLTA), membesarnya aliran air permukaan yang mengakibatkan meningkatnya ancaman bencana banjir dan longsor pada musim penghujan. Sementara itu, laju kebutuhan air terus bertambah, diperkirakan rata-rata meningkat sebesar 10% per tahun. Tabel 3 di bawah ini menjelaskan potensi, pemasalahan desentralisasi dan otonomi daerah serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya terkait dengan peran Kementerian PPN/Bappenas.

Tabel 3 IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS SERTA TINDAKLANJUT TERHADAP PERAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS		
LINGKUNGAN STRATEGIS EKSTERNAL NASIONAL: DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		
POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Semangat otonomi dan desentralisasi yang kuat.	1. Meningkatnya konflik antardaerah dalam pemanfaatan/pengelolaan sumberdaya alam	1. Peningkatan fasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan.
2. Potensi sumber daya daerah menjadi faktor pendukung pencapaian tujuan pembangunan.	2. Merenggangnya hubungan antarkelompok karena masalah geografis wilayah.	2. Perlu ditingkatkan koordinasi antara pusat dengan daerah, untuk menyusun dan menerapkan kebijakan/program penanganan permasalahan lingkungan hidup, sumber daya alam, kemiskinan (dan juga permasalahan lain) secara komprehensif dan terpadu.
3. Kultur dan sosial yang kuat menjadi faktor kunci keberhasilan dalam pembangunan.	3. Semakin merosotnya mutu lingkungan dan sumber daya alam.	
4. Jumlah penduduk dan geografis yang cukup memadai.	4. Angka kemiskinan yang masih besar.	

d. Globalisasi

Di samping persoalan lingkungan eksternal nasional di atas, globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional diyakini semakin berpengaruh dalam proses pembangunan Indonesia, seperti arus pandangan dan nilai-nilai (*values*) demokrasi dan kemajuan teknologi informasi (TI). Globalisasi menegaskan adanya hubungan timbal balik antara perkembangan suatu wilayah dengan kecenderungan global. Perkembangan kebudayaan masyarakat dan peradaban modern ditandai dengan semakin menyatunya atau semakin diakuinya nilai-nilai (*values*) universal sebagai nilai dasar bersama. Nilai-nilai universal tersebut berkembang dari keseluruhan proses perjalanan bangsa-bangsa di dunia.

Demokrasi menjadi salah satu nilai justifikasi yang menentukan daya terima masyarakat dunia terhadap suatu pemerintahan. Implikasinya, setiap pemerintahan dituntut untuk mampu menerapkan prinsip-prinsip demokratisasi dalam melayani masyarakat sekaligus warga dunia. Setiap negara dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan pelayanan kepada pelanggannya baik internal maupun eksternal dengan lebih terbuka, transparan, akuntabel, dalam kerangka hukum yang kuat. Arus pandangan global tersebut turut memicu terjadinya gerakan reformasi pada tahun 1998 yang menuntut pengelolaan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, yang antara lain transparansi, akuntabilitas, taat hukum, partisipasi, desentralisasi, dan keterbukaan.

Pada sisi lain, arus globalisasi juga telah meningkatkan peran-peran swasta dan masyarakat internasional yang diwakili oleh korporasi-korporasi yang bekerja pada tingkat multinasional ataupun kelembagaan swadaya masyarakat untuk bekerja lintas batas negara. Kelembagaan swasta dan masyarakat ini telah bekerja menggunakan prinsip-prinsip manajemen (birokrasi) yang sangat erat terkait dengan tipologi budaya, nilai-nilai, dan paradigma modern yang dibawanya. Dalam konteks ini, setiap pemerintahan dituntut untuk memahami interaksi dan komunikasi multikultural dalam pergaulan internasional, dan untuk mengelola keseluruhan kepentingan yang sangat beragam dalam konteks kepentingan nasional.

Kemudian, gelombang kecepatan teknologi informasi telah menghantarkan perubahan-perubahan yang sangat cepat. Perkembangan teknologi informasi telah memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dimulai dari awal kehidupan hingga berakhirnya kehidupan. Kehidupan seperti ini dikenal dengan *e-life*, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Saat ini sedang semarak muncul kegiatan yang dimulai dengan awalan huruf *e* seperti *e-commerce*, *e-government*, *e-education*, *e-library*, *e-journal*, *e-medicine*, *e-laboratory*, *e-biodiversity*, dan yang lainnya yang berbasis elektronika. Perkembangan teknologi informasi (TI) telah menempatkan

informasi menjadi industri tersendiri. Informasi telah menjadi material yang strategis bagi setiap institusi atau perusahaan. Sehingga setiap institusi/perusahaan memerlukan unit pengolahan data dan informasi tersendiri dengan menerapkan berbagai teknologi pengolahan informasi yang relevan. Namun demikian, seperti kemajuan di bidang apa pun, kemajuan teknologi informasi selain menimbulkan efek positif juga mengakibatkan terjadinya efek negatif dalam bentuk ancaman terhadap keamanan dan bidang-bidang lainnya.

Nilai informasi yang begitu penting dan strategis tersebut dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara dalam mengimplementasikan kebijakan dan mempersiapkan SDM agar memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Karena pada dasarnya apabila adopsi inovasi tidak dilakukan dengan meningkatkan kemampuan mengelolanya, bukan tidak mungkin TI dapat menjadi faktor delegitimasi terhadap birokrasi suatu negara. Secara praktis perkembangan TI telah memberikan banyak kemudahan dalam menunjang aktivitas manusia. Teknologi juga memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang dahulunya sulit dilakukan menjadi mudah, misalnya mengerjakan beberapa aktivitas kantor di rumah dan tidak perlu datang ke kantor. Kantor dalam pengertian fisik, saat ini bukanlah tempat satu-satunya dimana pegawai suatu organisasi harus mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugasnya. Beberapa pekerjaan dapat dilakukan di rumah, rapat dengan pimpinan dan kelompok kerja di rumah dengan menggunakan *internet working* tanpa harus kehilangan waktu dan biaya karena kemacetan, transportasi, dan sebagainya. Tabel 4 menjelaskan pengaruh globalisasi terhadap peran Kementerian PPN/Bappenas.

Tabel 4 IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS SERTA TINDAK LANJUT TERHADAP PERAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS		
LINGKUNGAN STRATEGIS EKSTERNAL LUAR NEGERI: GLOBALISASI		
POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Semakin diakuinya nilai-nilai (<i>values</i>) universal.	1. Kemampuan adaptasi (demokratisasi) yang belum sesuai harapan.	Peningkatan kemampuan pemerintah (Kementerian PPN/Bappenas) dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional yang dapat menjawab tantangan global yang semakin kompleks dengan perubahan yang sangat cepat.
2. Semakin meningkatnya peran swasta dan masyarakat internasional.	2. Kemampuan persaingan yang lemah.	
3. Semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.	3. Kemampuan sumber daya yang masih terbatas.	

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Kementerian PPN/Bappenas. Keberadaan sumber daya Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Namun sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya tersebut harus segera diatasi agar potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Salah satu contoh adalah potensi sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sangat memadai sebagaimana tercermin pada Tabel 5.

Dengan SDM yang berpendidikan tinggi, Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas lembaga dan unit kerjanya secara lebih baik. Di samping potensi-potensi positif dari SDM tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga dihadapkan pada beberapa potensi permasalahan, yaitu: a) SDM tersebut belum sepenuhnya diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; b) pola pembinaan pegawai, sejak rekrutmen, mutasi, rotasi dan promosi hingga pensiun masih belum sepenuhnya berbasiskan pada kompetensi; c) penerapan sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia masih belum optimal, dan perlu terus ditingkatkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan pegawai.

No.	Golongan	Pendidikan							Total
		S-3	S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	SD	
1	IV/e	5	4	-	-	-	-	-	9
2	IV/d	14	15	1	-	-	-	-	30
3	IV/c	21	25	2	-	-	-	-	48
4	IV/b	15	74	4	-	-	-	-	93
5	IV/a	16	75	11	-	-	-	-	102
	<i>Total Gol IV</i>	71	193	18	0	0	0	0	282
6	III/d	5	43	14	-	-	-	-	62
7	III/c	-	27	12	4	2	-	-	45
8	III/b	-	18	45	5	15	-	-	83
9	III/a	-	1	116	4	41	-	-	162

	<i>Total Gol III</i>	5	89	187	13	58	0	0	352
10	II/d	-	-	3	1	26	-	-	30
11	II/c	-	-	4	15	17	3	-	39
12	II/b	-	-	3		65	9	-	77
13	II/a	-	-	-	-	7	19	26	52
	<i>Total Gol II</i>	0	0	10	16	115	31	26	198
14	I/d	-	-	-	-	2	2	2	6
15	I/c	-	-	-	-	-	-	-	0
16	I/b	-	-	-	-	-	-	-	0
17	I/a	-	-	-	-	-	-	-	0
	<i>Total Gol I</i>	0	0	0	0	2	2	2	6
Total		76	282	215	29	175	33	28	838
		9.1%	33.7%	25.7%	3.5%	20.9%	3.9%	3.3%	100%

Data September 2009

Selain masalah sumber daya manusia, permasalahan lainnya adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, sarana dan prasarana sebagai alat mobilitas dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan yang masih terbatas, pedoman kerja yang relatif masih terbatas, serta masalah kelembagaan (struktur organisasi) yang masih memerlukan penataan. Adapun gambaran potensi, permasalahan, dan tindak lanjut penyelesaiannya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS SERTA TINDAKLANJUT TERHADAP PERAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS		
LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL: DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS		
POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. SDM dengan tingkat pendidikan yang tinggi	1. Manajemen SDM yang belum mengarah kepada peningkatan kinerja pegawai. 2. Belum ada kebijakan nasional yang jelas yang mengkaitkan antara kinerja pegawai dengan kinerja lembaga/unit kerja.	1. Mengembangkan dan menerapkan manajemen kinerja, yang mengkaitkan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja individu. Manajemen kinerja tersebut mencakup: indikator kinerja lembaga, unit kerja dan individu/pegawai, pengukuran dan evaluasi kinerjanya, serta penerapan penghargaan dan sanksi (<i>reward and punishment</i>) termasuk penerapan "remunerasi"/tunjangan kinerja secara akuntabel.
2. Anggaran yang cukup memadai	3. Pengelolaan kegiatan dan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja. 4. Kurang terarahnya penentuan prioritas penggunaan anggaran sesuai dengan arah dan tujuan organisasi.	2. Pengembangan manajemen SDM berbasis kompetensi dan sistem merit. 3. Perlu diperjelas arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran.
3. Kualitas sarana dan prasarana cukup memadai.	5. Kuantitas sarana dan prasarana belum tercukupi.	4. Perlu ditingkatkan kuantitas sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan

Tabel 6 IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS SERTA TINDAKLANJUT TERHADAP PERAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS		
LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL: DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS		
POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		aset.
4. Tersedianya ketatalaksanaan (pedoman prosedur kerja, <i>standard operating procedures/SOP</i>) untuk mendukung pelaksanaan tupoksi.	5. Masih kurangnya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi.	5. Perlu dilengkapi ketatalaksanaan (prosedur kerja, SOP) untuk mendukung kebutuhan organisasi.
5. Landasan hukum kelembagaan cukup jelas	6. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan, khususnya struktur organisasi, untuk mendukung peningkatan kinerja Kementerian PPN/Bappenas.	6. Perlu dilakukan penataan kelembagaan (struktur, tupoksi, indikator kinerja utama kelembagaan, prosedur kerja, dan sebagainya) agar dapat mendukung peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja. 7. Sosialisasi kepada para pejabat dan staf tentang upaya dan hasil penataan kelembagaan tersebut di atas.

Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang telah diuraikan di atas akan berdampak kepada pelaksanaan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam periode 2010-2014. Berbagai permasalahan di atas, baik eksternal maupun internal merupakan **tantangan** yang harus di atasi Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rencana Strategis Tahun 2010-2014, yang berisi visi, misi dan tujuan organisasi Kementerian PPN/Bappenas pada periode 2010-2014 dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja utama (*key performance indicators*) dari lembaga hingga unit kerja eselon II. Salah satu solusi atau tindak lanjut strategis di internal Kementerian PPN/Bappenas untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut adalah dengan membangun dan menerapkan manajemen kinerja, yang menghubungkan antara kinerja lembaga, unit kerja hingga kinerja individu secara terpadu dalam suatu sistem manajemen kinerja. Untuk kinerja lembaga dan unit kerja, sudah ada Renstra, Renja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP, walaupun perlu disempurnakan). Sedangkan kinerja pegawai masih menggunakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang sulit digunakan untuk menilai kinerja pegawai secara akuntabel. Walaupun manajemen kinerja yang mengintegrasikan kinerja lembaga, unit kerja dan individu sangat diperlukan dan sejalan dengan kebijakan anggaran berbasis kinerja, namun secara nasional hingga saat ini belum ada kebijakan yang mendorong pengembangan manajemen kinerja tersebut. Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas, berinisiatif untuk mengembangkan dan menerapkan manajemen kinerja seperti dimaksud di atas.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

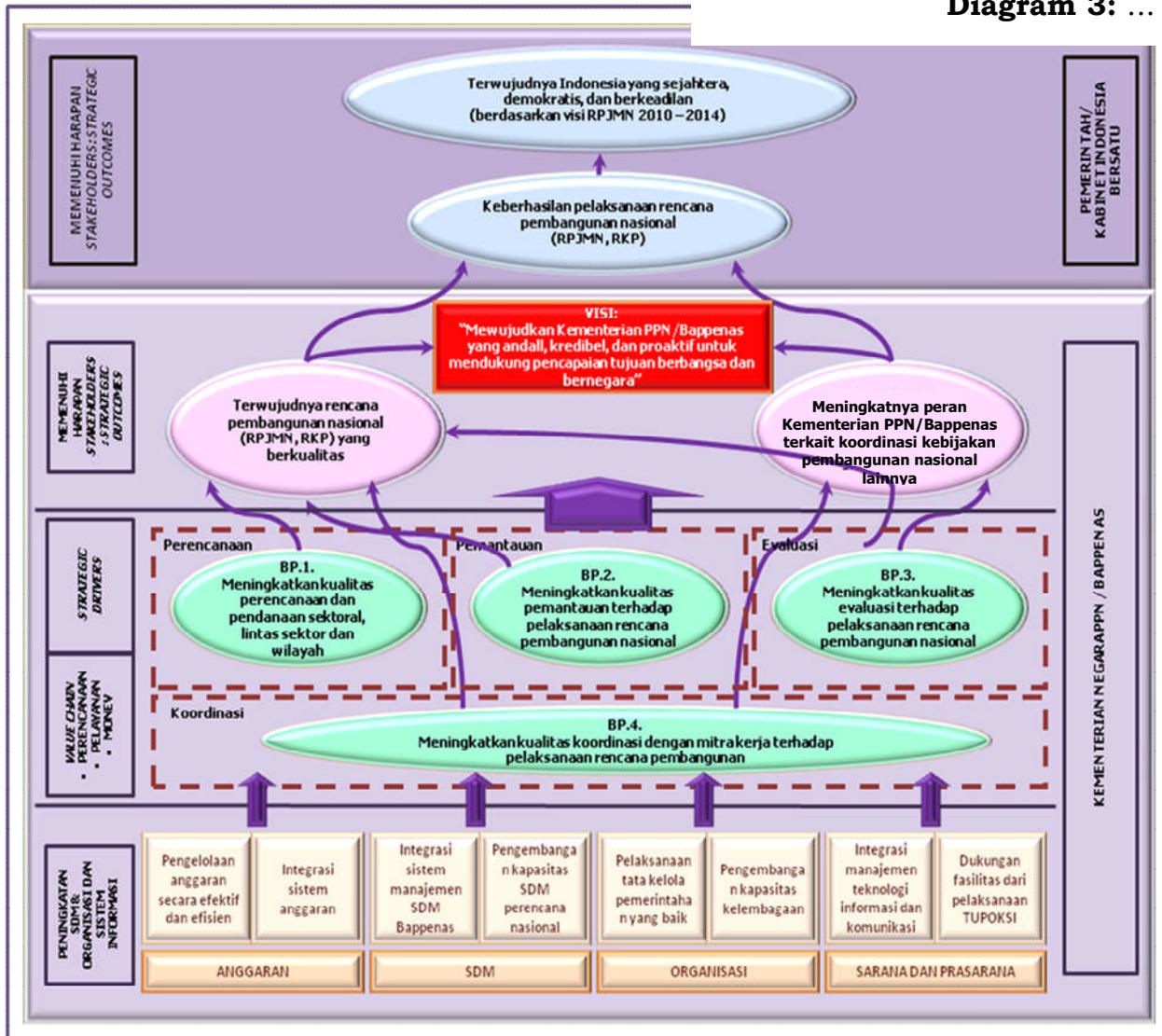
Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan nasional. Untuk itu, disusun visi dan misi Kementerian PPN/Bappenas yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung sebagaimana tampak dalam *strategy map* pada Diagram 3. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMN 2010-2014.

Pada gambar tersebut, terlihat keterkaitan antara tujuan dan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas dengan keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP, yang menjadi tanggung jawab semua kementerian/lembaga atau Kabinet Indonesia Bersatu II. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa tujuan dan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas harus diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP. Hal ini juga berlaku bagi kementerian/lembaga lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Ada 2 (dua) tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu: terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Kedua tujuan tersebut dicapai melalui 4 kegiatan utama (*business process, BP*) yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi; dan didukung dengan 4 faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, organisasi, dan sarana dan prasarana kerja.

Diagram 3
PETA STRATEGI TAHUN 2010 - 2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Diagram 3: ...



2.1 Visi Kementerian PPN/Bappenas

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP, melalui penyusunan rencana pembangunan nasional (RPJMN, RKP) yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah.

Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan nasional

(RPJMN dan RKP) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Presiden/Pemerintah dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Presiden/Pemerintah.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Kementerian PPN/Bappenas telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMN 2010-2014, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh karena itu, Visi Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 adalah:

”Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”

Penjelasan Visi:

Proses perencanaan pembangunan nasional harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata andal, kredibel dan proaktif adalah sebagai berikut:

Andal : Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.

Kredibel: Menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, yang meliputi antara lain transparansi, taat hukum, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Proaktif: Antisipatif dan aktif dalam turut menentukan arah tujuan berbangsa dan bernegara, serta mampu dengan cepat menyelesaikan dan atau memberikan kontribusi secara signifikan dalam penyelesaian permasalahan pembangunan nasional.

2.2. Misi Kementerian PPN/Bappenas

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
 - a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
 - b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

Penjelasan Misi:

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas. Karena itu, ada 3 (tiga) Misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi: "Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara". Kementerian PPN/Bappenas bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Misi pertama ini sebagai bagian dari pelaksanaan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai pengambil kebijakan (*policy maker*).

Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja, tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang. Misi kedua ini merupakan pelaksanaan peran sebagai *think tank* yang strategis, mengingat hasil

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, kajian, evaluasi kebijakan dan rekomendasinya dapat digunakan sebagai masukan strategis kepada Presiden, kementerian/lembaga ataupun pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Selain itu, hasil *think tank*, juga dapat menjadi masukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) dan tahunan (RKP). Jika peran sebagai *think tank* ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan citra (*brand image*) Kementerian PPN/Bappenas. Karena itu, peningkatan kualitas peran sebagai *think tank* merupakan bagian dari pembangunan citra lembaga (*organizational brand image building*).

Kemudian, agar semua tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan pelaksanaan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan mengenai peran sebagai *administrator*, melekat dalam semua kegiatan khususnya dalam rangka pengelolaan kegiatan dan dokumentasi negara (rencana pembangunan, dokumen pinjaman hibah luar negeri, dan sebagainya) secara akuntabel. Karena itu, tidak diletakkan sebagai misi.

2.3. Tujuan Kementerian PPN/Bappenas

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan peta strategi, sebagai berikut:

1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas;
2. Terwujudnya koordinasi kebijakan pembangunan lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas; dan
3. Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas.

Tujuan pertama adalah sesuai dengan tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas di bidang perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas diharapkan mampu menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, baik berupa RPJMN maupun RKP. Tujuan kedua terkait dengan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya, misalnya dalam hal penanganan masalah-masalah yang memerlukan penanganan lintas instansi dan lintas sektor/bidang dengan skala besar, misalnya koordinasi penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias; serta penilaian terhadap perkiraan kerusakan dan kerugian (*damages and losses assessment*) yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi Sumatera Barat, sekaligus menilai kebutuhan (*needs assessment*) pemulihan pasca bencana; koordinasi penanganan perubahan iklim (*climate change*), dan sebagainya.

Sedangkan tujuan ketiga terkait dengan penguatan kapasitas kelembagaan (SDM, tata laksana, dan organisasi) untuk mewujudkan kinerja pelayanan Kementerian PPN/Bappenas.

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk ketiga tujuan tersebut di atas, dijelaskan dalam bagian Sasaran Strategis.

2.4. Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Peta Strategi (*Strategy Map*), “Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP,” yang menjadi tanggung jawab semua kementerian/lembaga atau Kabinet Indonesia Bersatu II, sangat ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab masing-masing kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP, diukur dari: a) persentase (%) pencapaian target/sasaran RPJMN 2010-2014; dan b) persentase (%) pencapaian target RKP setiap tahun pada periode RPJMN 2010-2014.

Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 tersebut, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk ketiga tujuan Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama: “Terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah nasional dan tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas”, adalah:
 - 1) Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, yang diukur dari (indikator):
 - a) RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun 2010 sampai dengan 2014 memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur;
 - b) % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN dengan RPJPN;
 - c) % kesesuaian antara muatan RPJMN dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih;
 - d) % kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN;
 - e) Renstra Kementerian/Lembaga memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur, serta sesuai dengan RPJMN 2010-2014;
 - f) Renja Kementerian/Lembaga memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur, serta sesuai dengan RKP;
 - g) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur, serta sesuai dengan RKP;
 - h) % sasaran prioritas nasional yang telah sesuai dengan rencana.

- 2) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap RPJMN 2010-2014, yang diukur dari pendapat *stakeholders* tentang proses penyusunan RPJMN.
 - 3) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap RKP, diukur dari pendapat *stakeholders* tentang proses penyusunan RKP.
- b. Sasaran Strategis dari tujuan kedua: “Terwujudnya koordinasi kebijakan pembangunan lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas”, adalah:
Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya, diukur dari % tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas.
- c. Sasaran Strategis dari tujuan ketiga: “Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/ Bappenas”, adalah:
Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas, yang diukur dari:
- a) % pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM;
 - b) % ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas;
 - c) % fasilitasi dan pembinaan SDM aparatur perencana pusat dan daerah;
 - d) Opini dari BPK atas laporan keuangan; dan
 - e) Standar penilaian *good governance*.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, ditetapkan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas, yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I, arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang, seperti demokratisasi, desentralisasi, otonomi daerah, pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, RPJMN 2010-2014 menentukan 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu: 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2) Pendidikan; 3) Kesehatan; 4) Penanggulangan Kemiskinan; 5) Ketahanan Pangan; 6) Infrastruktur; 7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8) Energi; 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Teluar dan Pasca Konflik; dan 11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Selain kesebelas Program Prioritas tersebut, terdapat pula Prioritas Bidang Hukum dan Aparatur (Buku II RPJMN 2010-2014) yang menjadi acuan Renstra Kementerian PPN/Bappenas, yaitu Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan 4 (empat) fokus prioritas, sebagai berikut: 1) peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; 2) peningkatan kualitas pelayanan publik; 3) peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; dan 4) pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi. Prioritas dan keempat fokus prioritas tersebut mengandung makna perbaikan atau peningkatan kinerja.

Walaupun Kementerian PPN/Bappenas tidak ditunjuk sebagai penanggung jawab atau pelaksana dari kesebelas Program Prioritas Nasional dan Program 5 Tahun Kabinet Indonesia Bersatu II, namun Kementerian PPN/Bappenas berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMN dan Program 5 Tahun Kabinet Indonesia Bersatu II. Dukungan tersebut, harus tercemin dari kontribusi atau nilai pemanfaatan produk-produk Kementerian PPN/Bappenas, berupa: a) produk-produk perencanaan pembangunan (RPJMN, RKP) yang lebih berkualitas; b) hasil-hasil pemantauan, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, dan evaluasi kebijakan yang menjadi masukan bagi tindak lanjut perbaikan, proses perencanaan pembangunan, dan masukan bagi perumusan kebijakan pembangunan nasional; c) hasil-hasil pelaksanaan tugas lain (penugasan khusus) dari Presiden/Pemerintah.

Kemudian, Kementerian PPN/Bappenas sebagai instansi pemerintah juga berkewajiban menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan tugas dan fungsinya secara akuntabel, bersih dan bebas KKN, peningkatan kinerja lembaga dan pegawai, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi. Penerapan tata kelola tersebut dilakukan melalui pemantapan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas, yang sudah dilaksanakan secara bertahap dan intensif sejak tahun 2008.

Adapun arah kebijakan nasional yang menjadi acuan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 adalah sebagaimana yang tercantum dalam Buku II RPJMN 2010-2014 Bab XI Sistem Pendukung Manajemen Pembangunan Nasional, yaitu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik dari tahun ke tahun, sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian-bagian sebelumnya dalam Renstra ini. Karena itu, arah kebijakan tersebut menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan, yaitu: “mewujudkan proses perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan”. Dengan peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut, maka diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan juga lebih baik atau lebih berkualitas, dalam arti: lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun; terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah.

Sebagai salah satu bagian atau fungsi dari manajemen pembangunan nasional, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan tersebut harus terkait dengan fungsi-fungsi lainnya yaitu: sistem penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan bahkan pengawasannya. Keterkaitan ini sangat penting agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, akuntabel dan berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003, perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kebijakan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) agar dapat menjamin hubungan yang lebih jelas antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan instansi pemerintah serta memudahkan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengawasannya untuk melihat ukuran keberhasilan dan akuntabilitasnya.

Sedangkan strategi untuk melaksanakan kebijakan dan program di atas, selain disusun dengan mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 2 ayat (4), juga dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang telah diuraikan dalam Bab Pendahuluan. Strategi tersebut adalah: a) mengkoordinasikan para pelaku pembangunan; b) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan c) melakukan berbagai upaya untuk: (1) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; (2) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan (3) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PPN/Bappenas

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2010-2014 adalah sebagai berikut :

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan:

- 1) Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- 2) Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja.
- 3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
- 4) Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 5) Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga dan pegawai.

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal:

Eksternal:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral dan wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- 2) Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
- 3) Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
- 4) Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan.
- 5) Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional.

Internal:

- 6) Membangun Manajemen Kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai.
- 7) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

- 8) Meningkatkan kompetensi SDM di Kementerian PPN/Bappenas dan perencana di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel.
- 9) Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Kementerian PPN/Bappenas.
- 10) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2010-2014, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program teknis

Program Perencanaan Pembangunan Nasional.

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.

b. Program generik

- 1) Program generik 1: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
- 2) Program generik 2: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program generik 3: Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Dalam Renstra periode sebelumnya (2005-2009), ada 5 (lima) program yang digunakan Kementerian PPN/Bappenas yaitu: 1) Program Penataan Kelembagaan dan Ketalaksanaan; 2) Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik; 3) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara; 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara; dan 5) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur. Kelima program tersebut merupakan program generik yang juga digunakan oleh semua kementerian/lembaga baik seluruh program maupun sebagian dari kelima program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua kementerian/lembaga), maka kelima program tersebut tidak dapat mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), peran dan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, sehingga menyulitkan pengukuran kinerjanya.

Dibandingkan dengan program-program dalam Renstra 2005-2009, jumlah program dalam Renstra 2010-2014 lebih sedikit. Perbedaan lainnya ada pada substansi dan masalah kesesuaian dengan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas. Program Perencanaan Pembangunan Nasional lebih sesuai dengan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas, yang semula bernama Program Penataan Kelembagaan dan Ketalaksanaan yang bersifat generik dan

digunakan oleh semua kementerian/lembaga sehingga tidak sesuai atau tidak relevan untuk mengukur kinerja utama (tupoksi) masing-masing kementerian/lembaga. Sedangkan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, yang semula bernama Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik, adalah program generik yang dapat digunakan semua kementerian/lembaga. Cakupan substansi Program Dukungan Manajemen lebih fleksibel dan relevan untuk menampung kegiatan-kegiatan pendukung, termasuk gaji dan tunjangan pegawai.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Kementerian PPN/Bappenas, sebagai berikut:

a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Program Perencanaan Pembangunan Nasional:

- 1) Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/penganggarnya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/fungsi pemerintahan.
- 2) Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
- 3) Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan.
- 4) Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 5) Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional.

b. Kegiatan untuk melaksanakan ketiga program generik (pendukung):

- 1) Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah.
- 2) Penyempurnaan ketatalaksanaan.
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.
- 4) Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan prasarana kerja lainnya.
- 5) Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas.
- 6) Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga (*brand image building*).
- 7) Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 8) Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.
- 9) Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah.

Tabel 7
Hubungan Visi, Misi, hingga Program dan Kegiatan 2010-2014 Kementerian PNBappenas

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
<p>Mewujudkan Kenentrian PPW Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan bangsa dan bemegeta</p>	<p>1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:</p> <p>a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarmeng, antarmwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;</p> <p>b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;</p> <p>c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;</p> <p>d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;</p> <p>2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan</p>	<p>1. Tenujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas.</p> <p>2. Tenujudnya koordinasi kebijakan pembangunan lainnya sesuai peran Kementerian PNBappenas</p> <p>3. Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PNBappenas</p>	<p>1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarmwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, yang didukur dari (indikator):</p> <p>a. RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur;</p> <p>b. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN dengan RPJPN;</p> <p>c. % kesesuaian antara muatan RPJMN dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih;</p> <p>d. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN;</p> <p>e. Rensstra Kementerian-antLemba dan RPJMN Daerah memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur serta sesuai dengan RPJMN 2010-2014; f. Rensja Kementerian/</p>	<p>1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui pematapan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional, serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.</p> <p>2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja.</p> <p>3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakankajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.</p> <p>4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.</p> <p>5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (<i>better performance</i>) lembaga dan pegawai.</p>	<p>A. Eksternal:</p> <p>1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pendanaan sektoral, lintas sektoral dan wilayah;</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional;</p> <p>3. Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional;</p> <p>4. Meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan sebagai masukan dalam rangka proses perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan pembangunan di berbagai bidang, dan atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2010-2015 dan Program 5 Tahun Kabinet Indonesia Bersatu II.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan nasional;</p> <p>B. Internal:</p> <p>6. Membangun Manajemen Kinerja dari kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai;</p> <p>7. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel.</p>	<p>A. Program teknis</p> <p>Program Perencanaan Pembangunan Nasional</p> <p>B. Program genetik</p> <p>1. Program Dukungan Manajemen</p> <p>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>3. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur</p>	<p>A. Kegiatan-kegiatan utama dalam Program Perencanaan Pembangunan Nasional:</p> <p>1. Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/ penganggarnya antarmwaktu, sektor, wilayah dan antaringkat/fungsi pemerintahan.</p> <p>2. Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.</p> <p>3. Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan.</p> <p>4. Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional.</p> <p>B. Kegiatan-kegiatan utama dalam ketiga program genetik:</p> <p>1. Peningkatan kapasitas kelembagaan,</p> <p>2. Penyempurnaan ketatalaksanaan,</p> <p>3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PNBappenas dan aparatur perencanaan di instansi tingkat pusat dan daerah,</p> <p>4. Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan prasarana kerja lainnya,</p>

Tabel 7
Hubungan Visi, Misi, hingga Program dan Kegiatan 2010-2014 Kementerian PPN/Bappenas

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
	<p>rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas, sebagai masukan untuk tindak lanjut perbaikan, proses perencanaan berikutnya dan untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.</p> <p>3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.</p>		<p>Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan sesuai dengan RKP, 9. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA K/L) memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur, serta sesuai dengan RKP.</p> <p>h. % sasaran prioritas nasional yang telah sesuai dengan rencana.</p> <p>2. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN -2014, yang diukur dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RPJMN <p>3. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP, diukur dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP <p>4. Meningkatkan peran Kementerian PPN/Bappenas terkait</p>		<p>8. Meningkatkan kompetensi SDM di Bappenas dan perencanaan di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akurat.</p> <p>9. Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> di Kementerian Negara PPN/Bappenas.</p> <p>10. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.</p>		<p>5. Penguasaan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas.</p> <p>6. Peningkatan kualitas ketumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga (<i>brand image building</i>).</p> <p>7. Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan.</p> <p>8. Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.</p>

Tabel 7
Hubungan Visi, Misi, hingga Program dan Kegiatan 2010-2014 Kementerian PPN/Bappenas

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
			koordiasi kebijakan pembangunan nasional lainnya, diukur dari: - % tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas 5. Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas, diukur dari: - % pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM - % ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas - % fasilitasi dan pembinaan SDM aparatur/perencana pusat dan daerah - Opini dan BPK atas Laporan Keuangan - Standar penilaian <i>good governance</i>				

BAB IV PENUTUP

Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2010-2014 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2010-2014, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2010-2014.

Renstra Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ARMIDA S. ALISJAHBANA

**ANAK LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PPN /
KEPALA BAPPENAS
NOMOR 4 TAHUN 2014**

Formulir 1

**KONTRAK KINERJA MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN PRESIDEN**

INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	KIL TERKAIT	WAKTU	UNIT ESELON II
<p>a. Memastikan tersusunnya Rencana Strategis Kementerian 2010-2014</p> <p>i. Menyusun usulan Rencana Strategis Kementerian 2010-2014 yang terdiri dari tahapan kerja, rencana aksi Kementerian, indikator kinerja utama, dan tenggat waktu</p> <p>ii. Menyempurnakan Rencana Strategis Kementerian 2010-2014 melalui koordinasi yang efektif dengan Menteri Keuangan</p>			<p>Paling lambat tanggal 20 November 2009</p> <p>Paling lambat tanggal 31 Desember 2009</p>	

KONTRAK KINERJA MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN PRESIDEN				
INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	KIL TERKAIT	WAKTU	UNIT ESELON II
<p>b. Memastikan tercapainya target capaian Program 100 Hari</p> <p>i. Memastikan penetapan skema <i>co-financing</i> bagi program pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (penciptaan <i>ownership</i> di daerah) serta Pemerintah dan Swasta/BUMN (<i>Public Private Partnership</i>)</p> <p>ii. Meyempumakan Keppres 80/2003 mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mencakup skema <i>co-financing</i> dan mengakomodasi tata cara pengadaan hasil industri kreatif, inovatif, budaya, dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan sebelum Januari 2010</p>			<p>Paling lambat Januari 2010, kecuali dinyatakan secara spesifik pada program terkait</p>	

KONTRAK KINERJA MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN PRESIDEN				
INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	KIL TERKAIT	WAKTU	UNIT ESELON II
<p>c. Memastikan tercapainya Prioritas Nasional, yang mencakup namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Merencanakan dengan seksama program pembangunan menuju tercapainya sasaran-sasaran nasional ii. Memastikan reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakefektifan dan inkonsistensi dalam implementasinya 			<p>Paling lambat Oktober 2014 kecuali dinyatakan secara spesifik pada program terkait</p>	
<p>d. Melaksanakan reformasi bidang pelayanan umum</p> <p>Mengkaji ulang dan mengusulkan perbaikan kebijakan, peraturan, dan proses pelaksanaan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan umum yang diberikan jajaran Kementerian secara tuntas</p>			<p>Paling lambat Juni 2010</p>	

KONTRAK KINERJA MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN PRESIDEN				
INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	K/L TERKAIT	WAKTU	UNIT ESELON II
<p>sebelum Juni 2010 serta memastikan efektivitas implementasi perbaikan peraturan tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk Presiden untuk memimpin reformasi pelayanan umum</p>				
<p>e. Melaksanakan perbaikan peraturan yang mendukung investasi</p> <p>Mengkaji dan mengusulkan perbaikan peraturan-peraturan yang menghambat dan berpotensi menghambat investasi sebelum Juni 2010 dan memastikan efektivitas perbaikan peraturan tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan</p>			Paling lambat Juni 2010	
<p>f. Melakukan penyempurnaan kebijakan dan peraturan subsidi</p> <p>Mengkaji dan mengusulkan penyempurnaan kebijakan dan peraturan mengenai subsidi BBM, listrik, dan pupuk sebelum Juni 2010 dan memastikan efektivitas</p>			Paling lambat Juni 2010	

KONTRAK KINERJA MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN PRESIDEN				
INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI	KIL TERKAIT	WAKTU	UNIT ESELON II
peraturan yang disempurnakan tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan				
g. Mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis Kementerian 2010-2014			Sesuai target waktu dalam Rencana Strategis Kementerian 2010-2014	
h. Pengelolaan keuangan Kementerian memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI			Memperhatikan WTP	

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ARMIDA S. ALISJAHBANA

**ANAK LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR 4 TAHUN 2014**

**TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL LIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Formulir 1a

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
Program	Outcome							
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	1. Temuannya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas 2. Menjalankannya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya	1. RPJMN 2010-2014 dan RKP/Rahun 2010 sampai dengan tahun 2014 memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur 2. % kesesuaian antara matriks rancangan RPJMN dengan RPJPN 3. % kesesuaian antara matriks RPJMN dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih 4. % kesesuaian antara matriks rancangan RKP dengan RPJMN 5. % kesesuaian rancangan Panitia KI dengan landfesiapan dalam rancangan RPJMN 6. % kesesuaian rancangan Reng KI dengan landfesiapan dalam rancangan RKP 7. % kesesuaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL) dengan landfesiapan dalam rancangan RKP 8. % sasaran prioritas nasional yang telah selesai dengan rencana 9. Peringkat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan RPJMN 10. Peringkat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan RKP 11. Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 70%	- - - 100% - 100% - - - - 75%	- - - 100% - 100% - - - - 80%	- - - 100% - 100% - - - - 85%	100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% 100% baik baik 30%	Kementerian PPN/Bappenas

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Formulir 1a

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas-tugas Lainnya Bappenas	Outcome Teralesannya dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan PPN/Bappenas	1. % paka kegunaan informasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan keletterbagaian keatalaksanaan, dan sumber daya manusia 2. % fasilitas dan pembinaan SDM/aparatut pemnana pusat dan daerah	50%	80%	90%	100%	100%	
Program Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	Outcome Ketersedian sarana dan prasarana aparatut pemerintahan PPN/Bappenas	1. % ketersediaan sarana dan prasarana aparatut pemerintahan PPN/Bappenas 2. Terlaksananya pembangunan gedung baru Bappenas	60%	60%	70%	70%	80%	
Program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	Outcome Kembangnya akuntabilitas dan pengawasan aparatut pemerintahan PPN/Bappenas	Opini dari BPK atas laporan keuangan aparatut pemerintahan gov' governance	WTP baik	WTP baik	WTP baik	WTP baik	WTP baik	

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ARMIDA S. ALISJAHBANA

**ANAK LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PPN /
KEPALA BAPPENAS
NOMOR 4 TAHUN 2014**

Formulir 1.b

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL								
Unit Kerja Eselon I: Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional								
PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	Meningkatnya pelaksanaan tugas manajemen/kelembagaan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas	1. % pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui peltakaan kelembagaan, ketalaksanaan, dan sumber daya manusia (mencakup semua bidang di bawah Setman dan Inspektoral) 2. Tingkat kepuasan pelayanan internal Kementerian PPN/Bappenas 3. % jumlah aparatur pemerintahan pusat dan daerah yang mengikuti diklat perencanaan 4. Kecepatan waktu penyelesaian dokumen kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas (LAKIP, Renstra, Renja, DIPA, administrasi kepegawaian, kenaikan pangkat, pensiun, dll) 5. % peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan nasional (baik melalui e- <i>planning</i> , e- <i>monitor</i> , intranet, website) 6. % pejabat telah merandatangani dan melaksanakan pakta integritas 7. % pengakuan penggunaan e- <i>procurement</i> 8. % tersumanya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif, efisien	50%	100%	-	-	-	Sekretariat Kementerian PPN/ Sekretariat Utama Bappenas
			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
			85%	85%	85%	85%	85%	
			100%	100%	100%	100%	100%	
			80%	85%	90%	90%	100%	
			-	-	-	-	100%	
			-	-	-	-	75%	
			-	-	-	-	100%	

Formulir 1.b

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARAT UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas	9. Tersedianya sistem rekrutmen yang transparan	-	-	-	-	100%	
		10. Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur	-	-	-	-	100%	
		11. Tersusunnya rencana pelaksanaan e-Government yang konkrit dan terukur	-	-	-	-	100%	
		12. % penerapan SAKIP (tenstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dll)	-	-	-	-	100%	
		13. Dini BPK atau LK K/L	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		1. % ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas	60%	60%	70%	70%	80%	
		2. Terlaksananya pembangunan gedung baru Bappenas	-	10%	30%	100%	-	

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL								
Unit Kerja Eselon I : Kedepuan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan								
PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
Program	Outcome							
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Meningkatnya kualitas rancangan rencana pembangunan dan pendanaan nasional terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan	1. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan dengan RPJPN 2. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan dengan visi, misi, dan program Presiden Terpilih 3. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan dengan lingkup lainnya dalam RPJMN 4. Rancangan RPJMN terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan 5. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan dengan RPJMN 6. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan dengan lingkup lainnya dalam RKP 7. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan. - RPJMN - RKP	100%	-	-	-	100%	Kedepuan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

Formulir 1.b

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
		8. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
		9. % kepatatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan	100%	-	-	-	-	
		10. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		11. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup sumber daya manusia dan kebudayaan dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	

Formulir 1b

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/LABDAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Meningkatnya kualitas rancangan rencana pembangunan dan pertahanan nasional terkait lingkup politik, hukum, pertahanan, dan keamanan	1. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dengan RPJPN 2. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih 3. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dengan lingkup lainnya dalam RPJMN 4. Rancangan RPJMN terkait lingkup politik, hukum, pertahanan, dan keamanan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan 5. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dengan RPJMN 6. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP terkait lingkup politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dengan lingkup lainnya dalam RKP 7. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup politik, hukum, pertahanan, dan keamanan: - RPJMN - RKP	100%	-	-	-	100%	Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
			100%	100%	100%	100%	100%	

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
		3. % program atau kegiatan dalam RKP dan RP-JMN tahun berjalan terkait lingkup politik, hukum, pertahanan, dan keamanan yang dipantau: - RP/JMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kegiatan terkait lingkup politik, hukum, pertahanan, dan keamanan	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dengan target/pekerjaan dalam rancangan RP/JMN	100%	-	-	-	-	
		11. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
		8. % program atau kegiatan dalam RKP dan RP-UMN tahun berjalan terkait lingkup kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah yang dipantau: - RP-UMN - RKP	30%	40%	50%	60%	60%	
			30%	40%	50%	60%	60%	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. % kesesuaian rancangan Penstra KL terkait lingkup kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah dengan target/sasaran dalam rancangan RP-UMN	100%	-	-	-	-	
		11. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah dengan RKP dan pagu indikator	100%	100%	100%	100%	100%	

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL									
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014									
Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Ekonomi									
PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2010	2011	2012	2013	2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Meningkatnya kualitas rancangan rencana pembangunan dan pendanaan nasional terkait lingkup ekonomi	1. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup ekonomi dengan RPJPN 2. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup ekonomi dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih 3. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup ekonomi dengan lingkup lainnya dalam RPJMN 4. Rancangan RPJMN terkait lingkup ekonomi memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan 5. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup ekonomi dengan RPJMN 6. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP terkait lingkup ekonomi dengan lingkup lainnya dalam RKP 7. % kelayakan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup ekonomi: - RPJMN - RKP 8. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup ekonomi yang dipantau: - RPJMN - RKP 9. % kelayakan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup ekonomi	100%	-	-	-	100%	100%	Kedeputan Bidang Ekonomi

Formulir 1.b

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kelempaan Bidang Ekonomi

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3) 10. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup ekonomi dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN 11. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup ekonomi dengan RKP dan pagu indikator	(4) 100%	(5) -	(6) -	(7) -	(8) -	(9)

Formulir 1.b								
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014								
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL								
Unit Kerja Eselon I: Kedepuitan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup								
PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Meningkatnya kualitas rancangan rencana pembangunan dan pendanaan nasional terkait lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup	1. % kesesuaian antara muatan rancangan RP-JMNN terkait lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan RP-PJN 2. % kesesuaian antara muatan rancangan RP-JMNN terkait lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan visi, misi, dan program Presiden Terpilih 3. % kesesuaian antara muatan rancangan RP-JMNN terkait lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan lingkup lainnya dalam RP-JMNN 4. Rancangan RP-JMNN terkait lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pekerjaan yang ditetapkan 5. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan RP-JMNN 6. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP terkait lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan lingkup lainnya dalam RKP 7. % keepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup - RP-JMNN - RKP	100%	-	-	-	100%	Kedepuitan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedepuan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
		3. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dipantau: - RPJMN - RKP	100%	100%	100%	100%	100%	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup	100%	-	-	-	-	
		10. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		11. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	

Formulir 1.b

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedepuan Bidang Sarana dan Pasarana

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA			
			2010	2011	2012	2013	2014				
Program	Outcome										
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Memingkatkan kualitas rancangan rencana pembangunan dan pemahaman nasional terkait lingkup sarana dan pasarana	1. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup sarana dan pasarana dengan RPJPN 2. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup sarana dan pasarana dengan visi, misi dan program Presiden terpilih 3. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup sarana dan pasarana dengan lingkup lainnya dalam RPJMN 4. Rancangan RPJMN terkait lingkup sarana dan pasarana memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan 5. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup sarana dan pasarana dengan RPJMN 6. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP terkait lingkup sarana dan pasarana dengan lingkup lainnya dalam RKP 7. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup sarana dan pasarana. - RPJMN - RKP 8. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup sarana dan pasarana yang dipantau. - RPJMN - RKP	100%	-	-	-	100%	100%	100%	Kedepuan Bidang Sarana dan Pasarana	
			100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
			100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
			100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
			100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	
			100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	

Formulir 1b

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijaksanaan terkait lingkup sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup sarana dan prasarana dengan target/esaaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		11. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup sarana dan prasarana dengan RKP dan pagu indikator	100%	100%	100%	100%	100%	

FORMULIR 1.b TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL									
Unit Kerja Eselon I: Kedepuan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah									
PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Meningkatnya kualitas rancangan rencana pembangunan dan pendanaan nasional terkait lingkup pengembangan regional dan otonomi daerah	1. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup pengembangan regional dan otonomi daerah dengan R-PLRU 2. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup pengembangan regional dan otonomi daerah dengan visi, misi, dan program Presiden Terpilih 3. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN terkait lingkup pengembangan regional dan otonomi daerah dengan lingkup lainnya dalam RPJMN 4. Rancangan RPJMN terkait lingkup pengembangan regional dan otonomi daerah memiliki sasaran dan indikator yang terukur 5. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup pengembangan regional dan otonomi daerah dengan RPJMN 6. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP terkait lingkup pengembangan regional dan otonomi daerah dengan lingkup lainnya dalam RKP 7. % keepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengembangan regional dan otonomi daerah: <ul style="list-style-type: none"> - RPJMN - RKP 	100%	-	-	-	-	100%	Kedepuan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
			100%	-	-	-	-	100%	
			100%	-	-	-	-	100%	
			100%	-	-	-	-	100%	
			100%	-	-	-	-	100%	
			100%	-	-	-	-	100%	

Formulir 1b TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah									
PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2010	2011	2012	2013	2014		
		8. % program atau kegiatan dalam RKP dan RP JMN tahun berjalan terkait lingkup pengembangan regional dan otonomi daerah yang dapat dipantau: - RP JMN - RKP	-	-	100%	-	100%		
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup pengembangan regional dan otonomi daerah	100%	100%	100%	100%	100%		
		10. % kesesuaian rancangan Penstra KL terkait lingkup pengembangan regional dan otonomi daerah dengan target/sasaran dalam rancangan RP JMN	100%	-	-	-	-		
		11. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup pengembangan regional dan otonomi daerah dengan RKP dan pagu indikator	100%	100%	100%	100%	100%		

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijaksanaan terkait lingkup pendanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan koordinasi pelaksanaan rencana pendanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	

Formulir 1.b								
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014								
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL								
Unit Kerja Eselon I: Inspektorat Utama								
PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET				UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	Meningkatnya efektivitas SPP di Kementerian PPN/ Bappenas	1. Tingkat efektivitas SPP di Kementerian PPN/ Bappenas 2. Tingkat kapuasan internal di bidang pengawasan 3. Jumlah LHP yang disampaikan ke Menteri PPN/ Kepala Bappenas 4. Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi 5. Tersedia dan terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif 6. % temuan yang ditindaklanjuti 7. Opini BPK atas LK K/L 8. % unit pelayanan publik yang menerapkan manajemen pengadaan yang efektif 9. % penerapan SAKIP (renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dll)	5 60% 9 - - - - - - -	5 65% 9 - - - - - -	6 70% 9 - - - - -	6 75% 9 - - - - -	7 80% 9 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Inspektorat Utama

Formulir 1.b

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
Kegiatan Kegiatan penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan berupa kajian/teklahan	Output Dokumen hasil telaahan sesuai bidangnya	% hasil telaahan yang dimanfaatkan oleh pimpinan kementerian PNU/Bappenas dan unit kerja lainnya, serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan isu	100%	100%	100%	100%	100%	Staf Ahli Menteri PNU/Kepala Bappenas

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ARMIDA S. ALISJAHBANA

ANAK LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PPN /
KEPALA BAPPENAS
NOMOR 4 TAHUN 2014

Formulir 1.c

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIAT Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional								
PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
Kegiatan pelayanan kehumasan, keprotokolan/persidangan, dan ketelausahaan pimpinan	Dokumen hasil pelaksanaan kehumasan, keprotokolan/persidangan, dan ketelausahaan pimpinan	1. % penyelesaian kegiatan kehumasan, keprotokolan/persidangan, ketelausahaan pimpinan 2. % jumlah lembaga yang menjadi objek kehumasan (pemerintah maupun masyarakat) 3. Kecepatan waktu penyelesaian dalam mendukung pelayanan kehumasan, keprotokolan/persidangan, dan ketelausahaan pimpinan 4. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kehumasan, keprotokolan/persidangan, dan ketelausahaan pimpinan	100% 60% 100%	100% 70% 100%	100% 80% 100%	100% 90% 100%	100% 100% 100%	Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan
			3 dokumen					

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Unit Kerja Eselon I: Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
Kegiatan (1)	Output (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kegiatan penyusunan kebijakan dan pelayanan kepegawaian	Dokumen pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pelayanan kepegawaian	1. % perencanaan dan mutasi pegawai 2. % pencapaian target pengembangan SDM 3. % pencapaian target hasil pengelolaan jabatan fungsional 4. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDM 5. % pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan manajemen sumber daya manusia 6. % pelaporan penanganan pelanggaran disiplin 7. % pejabat telah mendatangi dan melaksanakan pakta integritas 8. % pejabat yang menerima pemberitahuan tentang kewajiban penyerahan LHKPN 9. Tersedianya sistem rekrutmen yang transparan 10. Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur 11. Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan	90% 85% 90% 32 60% - - - - - - - - - - -	95% 90% 95% 32 80% - - - - - - - - - - -	100% 94% 96% 32 90% - - - - - - - - - - -	100% 95% 100% 11 95% - - - - - - - - - - -	100% 96% 100% 8 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Biro Sumber Daya Manusia

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
Kegiatan	Output							
Kegiatan penyusunan perencanaan, analisis organisasi, dan tata laksana	Dokumen hasil pelaksanaan di bidang perencanaan, organisasi, dan tata laksana	1. % pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 2. % jumlah kontrak kinerja tahunan unit kerja eselon I dan II Kementerian PPN/Bappenas 3. % kesesuaian kegiatan unit-unit kerja eselon I dan II dengan tupoksinya 4. % kesesuaian RKA Kementerian PPN/Bappenas dengan pagu indikatif pemerintah 5. Ketepatan waktu penyelesaian pelaksanaan perencanaan, organisasi, dan tata laksana 6. Rata-rata ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan dan anggaran 7. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan di bidang perencanaan, kelembagaan, dan ketatalaksanaan: - Perencanaan (Renja, RKA/L DIPA) - Monev/Laporan monev, laporan PP 39, LAKIP) - Organisasi (peraturan organisasi, laporan evaluasi) - Ketatalaksanaan (SDP/edoman)	80%	100%	-	-	-	Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana
			100%	100%	100%	100%	100%	
			3 dokumen					
			5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
			1 dokumen					
			1 dokumen					

Formulir 1.c

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIAT UJMA Badan Perencanaan Pembangunan Nasional									
Unit Kerja Eselon I: Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional									
PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2010	2011	2012	2013	2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Kegiatan pelayanan umum dan keuangan	Output	1. Tingkat kepuasan internal terhadap pelayanan umum 2. % penyelesaian kegiatan pengelolaan perlengkapan dan tata usaha, urusan dalam, verifikasi anggaran, dan administrasi keuangan 3. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan tata usaha, urusan dalam, verifikasi anggaran, dan administrasi keuangan 4. Ketepatan waktu penyelesaian dalam mendukung pelayanan pengelolaan perlengkapan dan tata usaha, urusan dalam, verifikasi anggaran, dan administrasi keuangan 5. % pengadaan menggunakan e-procurement 6. Opini BPK atas LK K/L	60% 70% 23 dokumen 70% -	60% 70% 23 dokumen 70% -	70% 80% 23 dokumen 80% -	70% 90% 23 dokumen 90% -	80% 100% 23 dokumen 100% 75%	Biro Umum	
Kegiatan peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional	Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai	% ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas	WTP 60%	WTP 60%	WTP 70%	WTP 70%	WTP 80%		

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1) Kegiatan pembinaan perencanaan dan penyelenggaraan diklat perencanaan	(2) Output Dokumen hasil pelaksanaan pembinaan perencanaan dan penyelenggaraan diklat perencanaan	(3) 1. % kesesuaian hasil kajian diklat dan uFP yang digunakan dalam perumusan kebijakan diklat dan uFP 2. % target hasil seleksi yang tercapai 3. % peserta diklat yang telah diseleksi sesuai dengan tupoksi 4. % target penempatan yang tercapai 5. % jumlah peserta yang dimonitor berhasil dalam menyelesaikan studi 6. % kegiatan akreditasi dan penilaian yang dilaksanakan 7. Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan perencanaan dan penyelenggaraan diklat perencanaan	(4) 85%	(5) 85%	(6) 90%	(7) 90%	(8) 95%	(9) Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
			4 jenis dokumen					

Formulir 1.c

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kegiatan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional	Output dokumen pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional	1. % tingkat kemaparan prasarana TI (diukur dari kapasitas dan ketersediaan) 2. % tingkat implementasi aplikasi sesuai dengan kebutuhan (pengembangan dan evaluasi) 3. % tingkat ketersediaan dan penyajian data dan informasi (kualitas data/informasi yang tersedia dan penyajian) 4. % tingkat ketersediaan bahan kepustakaan dan berlingungnya kearsipan (tersedianya bahan pustaka dan pedoman kearsipan) 5. Tersusunnya rencana penneapan e-governement yang konkrit dan terukur 6. Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK	90% 90% 81% 30%	91% 90% 83% 36%	92% 80% 86% 89%	93% 80% 86% 90%	94% 80% 86% 95%	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
Kegiatan Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat	Output Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat	1. % kesesuaian muatan rancangan RP-JM/N terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih 2. Rancangan RP-JM/N terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat memiliki sasaran dan indikator yang teukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan 3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat dengan RP-JM/N 4. Rancangan RKP terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat memiliki sasaran dan indikator yang teukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan 5. Jumlah dokumen tan rangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat - RP/JM/N - RKP 6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat - RP/JM/N - RKP 7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RP/JM/N tahun berjalan terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat yang dibantu: - RP/JM/N - RKP	100%	-	-	-	100%	Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
			100%	100%	100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	100%	100%	

Formulir 1.c

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I : **Kedeputan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan**

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
		<p>3. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat secara berkala sesuai yang direncanakan</p> <p>9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat</p> <p>10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pemantauan/evaluasi kebijaksanaan terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat</p> <p>11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat dengan ta'ge/sasaran dalam rancangan RPJMN</p> <p>12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat dengan RKP dan pagu indikatif</p> <p>13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembayarannya/rujukan mutri dan PHLN) terkait lingkup kesehatan dan gizi masyarakat</p>	<p>3 laporan</p> <p>100%</p>	<p>3 laporan</p> <p>100%</p>	<p>3 laporan</p> <p>100%</p> <p>3 laporan</p> <p>100%</p> <p>3 laporan</p> <p>100%</p> <p>3 laporan</p> <p>100%</p>	<p>3 laporan</p> <p>100%</p> <p>3 laporan</p> <p>100%</p> <p>3 laporan</p> <p>100%</p> <p>3 laporan</p> <p>100%</p>	<p>3 laporan</p> <p>100%</p> <p>3 laporan</p> <p>100%</p> <p>3 laporan</p> <p>100%</p> <p>3 laporan</p> <p>100%</p>	

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
Kegiatan Pencapaian pembangunan nasional terkait lingkup pendidikan	Output Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pendidikan							Direktorat Pendidikan ⁽⁹⁾
		1. % kesesuaian muatan rancangan RPLMN terkait lingkup pendidikan dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	-	-	-	-	100%	
		2. Rancangan RPLMN terkait lingkup pendidikan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	-	-	-	-	100%	100%
		3. % kesesuaian muatan rancangan RCP terkait lingkup pendidikan dengan RPLMN	-	-	-	-	100%	100%
		4. Rancangan RCP terkait lingkup pendidikan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	-	-	-	-	100%	100%
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pendidikan: - RPLMN - RCP	-	-	-	-	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pendidikan: - RPLMN - RCP	-	-	-	-	100% 100%	100% 100%
		7. % program atau kegiatan dalam RCP dan RPLMN tahun berjalan terkait lingkup pendidikan yang dibantu: - RPLMN - RCP	-	-	-	-	100% 100%	100% 100%
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pendidikan secara berkala sesuai yang ditamanakan	-	-	-	-	3 laporan 100% 100%	3 laporan 100% 100%

Formulir 1.c									
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL									
Unit Kerja Eselon I: Kedepuitan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan									
PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2010	2011	2012	2013	2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup pendidikan	-	-	-	100%	100%		
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup pendidikan	-	-	-	3 laporan	3 laporan		
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup pendidikan dengan target/kesesuaian dalam rancangan RP-DMN	-	-	-	-	-		
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup pendidikan dengan RKP dan pagu indikatif	-	-	-	100%	100%		
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk subansistr rencana dan pembiayanya/ruiah murni dan PHLDN) terkait lingkup pendidikan	-	-	-	3 laporan	3 laporan		

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedepuan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
Kegiatan Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	Output Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih 2. Rancangan RPJMN terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pelebaran yang ditetapkan 3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dengan RPJMN 4. Rancangan RKP terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pelebaran yang ditetapkan 5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak: - RPJMN - RKP	100%	-	-	-	100%	Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I : Kedeputan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
		11. % kesesuaian rancangan Reastra KL terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk subsidi rencana dan pembiayaan/rujukan matri dan PHLN) terkait lingkup kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	3 laporan					

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
		7. % program atau kegiatan mitra kerja dalam RKP dan RPJMN Tahun berjalan terkait lingkup agama, kebudayaan, pemuda, dan olahraga yang dipantau: - RPJMN - RKP	-	-	-	100% 100%	100% 100%	
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup agama, kebudayaan, pemuda, dan olahraga secara berkala sesuai yang direncanakan	-	-	-	3 laporan	3 laporan	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijaksanaan terkait lingkup agama, kebudayaan, pemuda, dan olahraga	-	-	-	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijaksanaan terkait lingkup agama, kebudayaan, pemuda, dan olahraga	-	-	-	3 laporan	3 laporan	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup agama, kebudayaan, pemuda, dan olahraga dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	-	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup agama, kebudayaan, pemuda, dan olahraga dengan RKP dan pagu indikatif	-	-	-	100%	100%	

FORMULIR 1.c TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL								
Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan								
PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk sublembaga rencana dan pembayarannya) meliputi mumi dan PHLU) terkait lingkup agama, kebudayaan, pemuda, dan olahraga	-	-	-	3 laporan	3 laporan	

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/LBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Perencanaan, dan Keamanan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
Kegiatan	Output							
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup politik dan komunikasi	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup politik dan komunikasi	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup politik dan komunikasi dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih 2. Rancangan RPJMN terkait lingkup politik dan komunikasi memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan 3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup politik dan komunikasi dengan RPJMN 4. Rancangan RKP terkait lingkup politik dan komunikasi memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan 5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup politik dan komunikasi 6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup politik dan komunikasi 7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup politik dan komunikasi yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 90% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	- - 100% - 100% 100% 100% 100%	- - 100% - 100% 100% 100% 100%	- - 100% - 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Direktorat Politik dan Komunikasi 19

Formulir 1c

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Perintahan, dan Keamanan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup politik dan komunikasi secara berkala sesuai yang direncanakan	4 laporan					
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup politik dan komunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijaksanaan terkait lingkup politik dan komunikasi	2 laporan					
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup politik dan komunikasi dengan target sasaran dalam rancangan RP JMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup politik dan komunikasi dengan RKP dan pagu indikatif	70%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembiayaan/urupiah murni dan PHLN) terkait lingkup politik dan komunikasi	2 laporan					

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
1. Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup aparatur negara	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup aparatur negara	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup aparatur negara dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	Direktorat Aparatur Negara
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup aparatur negara memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup aparatur negara dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup aparatur negara memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup aparatur negara: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup aparatur negara: - RPJMN - RKP	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN Tahun berjalan terkait lingkup aparatur negara yang dipantau: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup aparatur negara secara berkala sesuai yang direncanakan	1 laporan 100%	1 laporan 100%	1 laporan 100%	1 laporan 100%	1 laporan 100%	

Formulir 1.c								
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL								
Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan								
PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup aparatur negara	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup aparatur Negara	1 laporan					
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup aparatur negara dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup aparatur negara dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk subsidi rencana dan pembayarannya/luaran murni dan PHLN) terkait lingkup aparatur negara	1 laporan					

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Formulir 1.c

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2010	2011	2012	2013	2014	
Kegiatan	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia		1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih 2. Rancangan RPJMN terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pelebaran yang ditetapkan 3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia dengan RPJMN 4. Rancangan RKP terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pelebaran yang ditetapkan 5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia: - RPJMN - RKP 6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atau pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia: - RPJMN - RKP 7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Direktoriat Hukum dan Hak Asasi Manusia
				1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen

FORMULIR 1.c TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Perencanaan, dan Keamanan								
PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. Jumlah laporan pemerintahan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia secara berkala sesuai yang direncanakan 9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia 10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangun/evaluasi kebijaksanaan terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia 11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia dengan target/tesaran dalam rancangan RP-JMN 12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia dengan RKP dan pagu indikatif 13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembayarannya) kepada munitri dan PHLUJ terkait lingkup hukum dan hak asasi manusia	1 laporan					
			100%	100%	100%	100%	100%	
			1 laporan					
			100%	-	-	-	-	
			100%	100%	100%	100%	100%	
			1 paket					

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
Kegiatan Analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan	Output Terselenggaranya sinergitas antara kebijakan dengan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan nasional	<ol style="list-style-type: none"> Tersusunnya dan tersosialisasinya Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional 2015-2019 Tersusunnya kerangka Regulasi dalam Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional 2015-2019 Tersusunnya draft Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 					1 dokumen 1 dokumen	Direktorat Analisis Peraturan Perundang- undangan

Formulir 1.c

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL								
Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Perintahan, dan Keamanan								
PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
Kegiatan Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup pertahanan dan keamanan	Output Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pertahanan dan keamanan	1. % kesesuaian muatan rancangan RP JMN terkait lingkup pertahanan dan keamanan dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih 2. Rancangan RP JMN terkait lingkup pertahanan dan keamanan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan 3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup pertahanan dan keamanan dengan RP JMN 4. Rancangan RKP terkait lingkup pertahanan dan keamanan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan 5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pertahanan dan keamanan: - RP JMN - RKP 6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pertahanan dan keamanan: - RP JMN - RKP	100%	-	-	-	100%	Direktorat Perintahan dan Keamanan
			100%	100%	100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	100%	100%	

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Politik, Hukum, Perintahan, dan Keamanan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		7. % program atau kegiatan mitra kerja dalam RKP dan RP JMN tahun berjalan terkait lingkup pertahanan dan keamanan yang dipantau - RP JMN - RKP	100%	100%	100%	100%	100%	
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pertahanan dan keamanan secara berkala sesuai yang direncanakan	1 laporan					
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup pertahanan dan keamanan	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup pertahanan dan keamanan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	2 laporan	
		11. % kesesuaian rancangan Fenstra KL terkait lingkup pertahanan dan keamanan dengan target/sasaran dalam rancangan RP JMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup pertahanan dan keamanan dengan RKP dan pagu indikator	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembayarannya/rujiah murni dan PHLN) terkait lingkup pertahanan dan keamanan	1 laporan					

Formulir 1.c

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BDAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
Kegiatan Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup penanggulangan kemiskinan	Output Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup penanggulangan kemiskinan							Direktorat Perencanaan kemiskinan
		1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup penanggulangan kemiskinan dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih	100%	-	-	-	100%	
		2. Rancangan RPJMN terkait lingkup penanggulangan kemiskinan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	-	-	-	100%	
		3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup penanggulangan kemiskinan dengan RPJMN	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Rancangan RKP terkait lingkup penanggulangan kemiskinan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup penanggulangan kemiskinan: - RPJMN - RKP	1 dokumen 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen
		6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atau pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup penanggulangan kemiskinan: - RPJMN - RKP	- 100%	- 100%	100% 100%	- 100%	100% 100%	100% 100%
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup penanggulangan kemiskinan yang dipantau: - RPJMN - RKP	- 40%	- 40%	60% 60%	- 75%	- 75%	75% 75%

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. Jumlah laporan pemantauan atau pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup penanganan kemiskinan secara berkala sesuai yang direncanakan	1 laporan					
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup penanganan kemiskinan	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup penanganan kemiskinan	1 laporan					
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup penanganan kemiskinan dengan sasaran dalam rancangan RPJMN	-	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup penanganan kemiskinan dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan perbendahyaannya) dirupiah mumi dan PHLN) terkait lingkup penanganan kemiskinan	1 laporan					

Formulir 1.c

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih 2. Rancangan RPJMN terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan 3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja dengan RPJMN 4. Rancangan RKP terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan 5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja: - RPJMN - RKP 6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja: - RPJMN - RKP	100% 100% 100% 100% -	- 100% -	- 100% -	- 100% -	100% 100% 100%	Direktorat Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja
Kegiatan	Output							

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RP-JMN tahun berjalan terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja yang dipantau: - RP-JMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja secara berkala sesuai yang direncanakan	1 laporan					
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja	3 laporan					
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja dengan target/pelaksanaan dalam rancangan RP-JMN	100%	-	-	-	-	-

Formulir 1.c

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Keputusan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3) 12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup Tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja dengan RKP dan pagu indikatif	(4) 100%	(5) 100%	(6) 100%	(7) 100%	(8) 100%	(9)

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedepunan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
Kegiatan Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah	Output Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih 2. Rancangan RPJMN terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan 3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah dengan RPJMN 4. Rancangan RKP terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan 5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah: - RPJMN - RKP 6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah: - RPJMN - RKP	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	- - 100% 100% 100% 100% -	- - 100% 100% 100% 100% -	- - 100% 100% 100% 100% -	85% 85% 85% 85% 85% 90% 90%	Direktoral Pembudayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Formulir-1.c

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RP-JMN tahun berjalan terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah yang dipantau: - RP-JMN - RKP	30% 30%	35% 35%	90% 90%	100% 100%	90% 90%	
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah secara berkala sesuai yang direncanakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijaksanaan terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah	100%	100%	100%	100%	90%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijaksanaan terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah dengan target/sasaran dalam rancangan RP-JMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	90%	

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk subsidi rencana dan pembiayaan/uriah mumi dan PHLN) terkait lingkup pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah	1 laporan					

Formulir 1.c

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
Kegiatan Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat	Output Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih 2. Rancangan RPJMN terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan 3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dengan RPJMN 4. Rancangan RKP terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan 5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat: - RPJMN - RKP 6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat: - RPJMN - RKP 	100% 100% 100% 100% 100%	- 100% 100% 100%	- 100% 100% 100%	- 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	Direktoral Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		7. % program atau kegiatan mitra kerja dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat yang dipantau: - RP-JMN - RKP	100% 100%	- -	- -	- -	100% 100%	
		8. Jumlah laporan pemahaman atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat secara berkala sesuai yang direncanakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat	2 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
		11. % kesesuaian rancangan Fenstra KL terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dengan target/sasaran dalam rancangan RP-JMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	

Formulir 1.e

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3) 13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk sub-stansi rencana dan pembayarannya) per tahun dan PHLN terkait lingkup perlindungan dan kesejahteraan masyarakat	(4) 1 laporan	(5) 1 laporan	(6) 1 laporan	(7) 1 laporan	(8) 1 laporan	(9)

Formulir 1.c								
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014								
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL								
Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup								
PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
10	20	3. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pangan dan pertanian secara berkala sesuai yang ditentukan	1 laporan	19				
		3. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup pangan dan pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup pangan dan pertanian	1 laporan					
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup pangan dan pertanian dengan target/ Sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup pangan dan pertanian dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk subsidi rencana dan pembiayaan/ruipah mumi dan PHLN) terkait lingkup pangan dan pertanian	1 laporan					

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
Kegiatan	Output							
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup kebutuhan dan konservasi sumber daya air	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kebutuhan dan konservasi sumber daya air	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup kebutuhan dan konservasi sumber daya air dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih 2. Rancangan RPJMN terkait lingkup kebutuhan dan konservasi sumber daya air memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pelembaan yang ditetapkan 3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup kebutuhan dan konservasi sumber daya air dengan RPJMN 4. Rancangan RKP terkait lingkup kebutuhan dan konservasi sumber daya air memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pelembaan yang ditetapkan 5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kebutuhan dan konservasi sumber daya air: - RPJMN - RKP 6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kebutuhan dan konservasi sumber daya air: - RPJMN - RKP	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	- 100% 100% 100% 100% 100%	- 100% 100% 100% 100% 100%	- 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100%	Direktorat Kebutuhan dan Konservasi Sumber Daya Air
			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
			100%	100%	100%	100%	100%	

Formulir 1c

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedepuitan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup kehutanan dan konservasi sumber daya air yang dibantu: - RPJMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kehutanan dan konservasi sumber daya air secara berkala sesuai yang ditamanakan	1 laporan					
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup kehutanan dan konservasi sumber daya air	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup kehutanan dan konservasi sumber daya air	1 laporan					
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup kehutanan dan konservasi sumber daya air dengan target/teseran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup kehutanan dan konservasi sumber daya air dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3) 13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembiajan/nyarupiah murni dan PHLN) terkait lingkup kehutanan dan konservasi sumber daya air	(4) 1 laporan	(5) 1 laporan	(6) 1 laporan	(7) 1 laporan	(8) 1 laporan	(9)

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014								
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL								
Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup								
PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Kegiatan	Output							
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup kelautan dan perikanan	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kelautan dan perikanan	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup kelautan dan perikanan dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih 2. Rancangan RPJMN terkait lingkup kelautan dan perikanan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan 3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup kelautan dan perikanan dengan RPJMN 4. Rancangan RKP terkait lingkup kelautan dan perikanan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan 5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kelautan dan perikanan: - RPJMN - RKP 6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atau pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup kelautan dan perikanan: - RPJMN - RKP 7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup kelautan dan perikanan yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	- - 100% - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - 100% - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - 100% - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	100% 100%	Direktorat Kelautan dan Perikanan

Formulir 1.c

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: **Kedepuan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2010	2011	2012	2013	2014		
Kegiatan	Output								
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan	1. % kesesuaian muatan rancangan RP JMN I terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih 2. Rancangan RP JMN I terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan 3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan dengan RP JMN 4. Rancangan RKP terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan 5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan: - RP JMN - RKP 6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan: - RP JMN - RKP	100% 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	- 1 dokumen	100% 1 dokumen	100% 1 dokumen	Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Fomulir 1.c

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
		7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan yang diantau: - RPJMN - RKP	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan secara berkala sesuai yang direncanakan	1 laporan					
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan	1 laporan					
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	

Formulir 1.c

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembiajan) meliputi mumi dan PHLN) terkait lingkup sumber daya energi, mineral, dan pertambangan	1 laporan					

FORMULIR 1.c TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup								
PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
		8. Jumlah laporan pemantauan atau pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup lingkungan hidup secara berkala sesuai yang direncanakan	1 laporan					
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijaksanaan terkait lingkup lingkungan hidup	1 laporan					
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup lingkungan hidup dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup lingkungan hidup dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembayarannya) di bidang murni dan PHLN) terkait lingkup lingkungan hidup	1 laporan					

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengairan dan irigasi secara berkala sesuai yang direncanakan	1 laporan					
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup pengairan dan irigasi	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakankajian terkait lingkup pengairan dan irigasi	1 laporan					
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup pengairan dan irigasi dengan target/sasaran dalam rancangan RP JMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup pengairan dan irigasi dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk subansi rencana dan pembajajannya/rujiah murni dan PHUN) terkait lingkup pengairan dan irigasi	1 laporan					

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
Kegiatan Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup transportasi	Output Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup transportasi	1. % keesediaan muatan rancangan RPJMN terkait lingkup transportasi dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih 2. Rancangan RPJMN terkait lingkup transportasi memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan 3. % keesediaan muatan rancangan RKP terkait lingkup transportasi dengan RPJMN 4. Rancangan RKP terkait lingkup transportasi memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan 5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup transportasi: - RPJMN - RKP 6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup transportasi: - RPJMN - RKP 7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup transportasi yang dipantau: - RPJMN - RKP	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Direktorat Transportasi

Formulir 1.e								
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014								
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL								
Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana								
PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		3. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup transportasi secara berkala sesuai yang direncanakan	1 laporan					
		9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup transportasi	100%	100%	100%	100%	100%	
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakankajian terkait lingkup transportasi	1 laporan					
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup transportasi dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN	100%	-	-	-	-	
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup transportasi dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk subsidi rencana dan pembiayaan/tupiah murni dan PHLN) terkait lingkup transportasi	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	5 laporan	

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedepuitan Bidang Sarana dan Pasarana

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA										
			2010	2011	2012	2013	2014											
Kegiatan Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup pemukiman dan perumahan	Output Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pemukiman dan perumahan	1. % kesesuaian muatan rancangan RPJMN terkait lingkup pemukiman dan perumahan dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih 2. Rancangan RPJMN terkait lingkup pemukiman dan perumahan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/bedoman yang ditetapkan 3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup pemukiman dan perumahan dengan RPJMN 4. Rancangan RKP terkait lingkup pemukiman dan perumahan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/bedoman yang ditetapkan 5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pemukiman dan perumahan: - RPJMN - RKP 6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pemukiman dan perumahan: - RPJMN - RKP 7. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN Tahun berjalan terkait lingkup pemukiman dan perumahan yang dipantau: - RPJMN - RKP	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			-	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
Kegiatan	Output							
Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika	1. % kesesuaian muatan rancangan RP JMN terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih 2. Rancangan RP JMN terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pekerjaan yang ditetapkan 3. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika dengan RP JMN 4. Rancangan RKP terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pekerjaan yang ditetapkan 5. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika: - RP JMN - RKP 6. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atau pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika: - RP JMN - RKP 7. % program atau kegiatan mitra kerja dalam RKP dan RP JMN tahun berjalan terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika yang dipantau: - RP JMN - RKP	100%	-	-	-	100%	
			1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen
			100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	100%	100%	100%	100%	100%

Direktorat Energi,
Telekomunikasi, dan
Informatika

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL								
Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana								
PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika secara berkala sesuai yang direncanakan	1 laporan					
		9. % kepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijaksanaan terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		10. Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijaksanaan terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika	1 laporan					
		11. % kesesuaian rancangan Renstra KL terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika dengan target/sasaran dalam rancangan RP-UMN	100%	-	-	-	-	-
		12. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika dengan RKP dan pagu indikatif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		13. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional (termasuk substansi rencana dan pembiayaan)/upah murni dan PHLN) terkait lingkup energi, telekomunikasi, dan informatika	1 laporan					

Formulir 1.c

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sarana dan Pazarana

Formulir 1.c

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
Kegiatan Perencanaan pembangunan nasional terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta	Output Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta	1. % kesesuaian muatan rancangan RKP terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta dengan RPJMN 2. % rancangan RKP terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta sesuai rencana pembangunan infrastruktur melalui KPS (PPP Bock) 3. Jumlah dokumen rancangan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta: - RPJMN - RKP 4. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta: - RPJMN - RKP 5. % program atau kegiatan dalam RKP dan RPJMN tahun berjalan terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta yang dipantau: - RPJMN - RKP 6. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta secara berkala sesuai yang direncanakan	100% 70% 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 75% - 1 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 30% - 1 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 85% - 1 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 30% - 1 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Direktoral Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Formulir 1c

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
10	20	7. % ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta	100% ⁽⁴⁾	100% ⁽³⁾	100% ⁽⁹⁾	100% ⁽⁷⁾	100% ⁽⁸⁾	9
		8. jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan/evaluasi kebijakan/kajian terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta	2 laporan					
		9. % kesesuaian rancangan Restra KL terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta dengan target/sasaran dalam rancangan RP JMN	100%	-	-	-	-	
		10. % kesesuaian Renja KL terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta dengan rencana pembangunan infrastruktur melalui KPS (PPP Book)	70%	75%	80%	85%	90%	
		11. Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan rencana pembangunan nasional terkait lingkup pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta	1 laporan					

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2010	2011	2012	2013	2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Kegiatan	Output								
Perencanaan pembangunan nasional bidang perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional bidang perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan	1. Tersusunnya rancangan perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan nasional 2. % kesesuaian muatan rancangan perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan dengan rancangan rencana pendanaan pembangunan nasional 3. Rancangan perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan memiliki sasaran dan target 4. Tersusunnya rancangan rencana pendanaan jangka menengah 5. % kesesuaian muatan rancangan rencana pendanaan jangka menengah dengan RPJMN 6. Tersusunnya rancangan rencana pendanaan tahunan 7. Tersusunnya rancangan rencana pendanaan pembangunan yang tepat waktu 8. % kepatatan waktu penyelesaian laporan pemantauan atas pelaksanaan perencanaan pendanaan pembangunan nasional serta pengembangannya 9. Jumlah laporan pemantauan atas pelaksanaan perencanaan pendanaan pembangunan nasional serta pengembangannya 10. % kepatatan waktu penyelesaian laporan evaluasi atas pelaksanaan/evaluasi kebijakan/kajian perencanaan pendanaan pembangunan nasional serta pengembangannya	1 paket	Direktoral Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan					

Formulir 1.c

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/LBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
		11. Jumlah laporan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pendanaan pembangunan nasional serta pengembangannya	1 laporan					
		12. % ketepatan waktu penyelesaian laporan koordinasi pengeluaran perencanaan pendanaan pembangunan nasional	100%	100%	100%	100%	100%	
		13. Jumlah laporan koordinasi pengelolaan perencanaan pendanaan pembangunan nasional	1 laporan					
		14. Jumlah laporan kinerja pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri				4 laporan	4 laporan	
		15. Tersusunnya rancangan laporan kinerja hasil pemerintahan pinjaman luar negeri yang tepat waktu				100%	100%	

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2010	2011	2012	2013	2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Perencanaan pembangunan nasional bidang alokasi pendanaan pembangunan	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional bidang alokasi pendanaan pembangunan	1. Jumlah dokumen usulan rancangan alokasi pendanaan pembangunan nasional dalam RP-JMN 2. % rancangan alokasi pendanaan pembangunan nasional dalam RP-JMN memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan 3. Jumlah dokumen usulan rancangan alokasi pendanaan pembangunan nasional dalam rancangan RKP 4. % usulan rencana alokasi pendanaan pembangunan nasional dalam RP-JMN yang dijabarkan dalam rancangan RKP 5. % rancangan RKP bidang alokasi pendanaan pembangunan memiliki sasaran dan indikator yang terukur sesuai kebijakan/pedoman yang ditetapkan 6. % ketepatan waktu penyelesaian rancangan kebijakan alokasi pendanaan pembangunan nasional (paqu indikator) 7. % ketepatan waktu penyelesaian laporan pemantauan (pasca-Perpres rindan APBN) atas pengelolaan alokasi pendanaan pembangunan nasional 8. Jumlah laporan pemantauan atas pengelolaan alokasi pendanaan pembangunan nasional 9. % ketepatan waktu penyelesaian laporan evaluasi atas pengelolaan alokasi pendanaan pembangunan nasional 10. Jumlah laporan evaluasi atas pengelolaan alokasi pendanaan pembangunan nasional	1 dokumen 90%	- -	- -	- -	- -	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan

Formulir 1.c

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
Kegiatan	Output							
Perencanaan pembangunan nasional/bidang pendanaan luar negeri multilateral	Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional/bidang pendanaan luar negeri multilateral	1. Tersusunnya naskah rancangan rencana pendanaan luar negeri multilateral jangka menengah 2. % kesesuaian prioritas kerjasama pendanaan multilateral dengan mitra pembangunan (donor/creditor) dan prioritas RPJMN 3. % kesesuaian kegiatan dalam naskah rancangan rencana pendanaan luar negeri multilateral jangka menengah dengan Rencana Pendanaan jangka Menengah 4. Tersusunnya daftar kegiatan pendanaan luar negeri multilateral periode tahunan 5. % kesesuaian daftar kegiatan pendanaan luar negeri multilateral periode tahunan dengan Rencana Pendanaan Tahunan 6. % rencana kegiatan yang mendapatkan komitmen pendanaan multilateral terhadap daftar kegiatan yang disiapkan/diusulkan 7. Tersusunnya rancangan kebijakan rencana pendanaan luar negeri multilateral 8. Tersusunnya laporan pemahaman atas pengelolaan rencana pendanaan luar negeri multilateral 9. Tersusunnya laporan evaluasi atas pengelolaan rencana/evaluasi kebijaksanaan pendanaan luar negeri multilateral 10. Tersusunnya laporan koordinasi pengelolaan rencana pendanaan luar negeri multilateral	7 dokumen	6 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	Direktoral Pendanaan Luar Negeri Multilateral
			80%	85%	90%	95%	100%	
			80%	85%	90%	95%	100%	
			60%	70%	80%	80%	100%	
			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	
			1 laporan					
			1 laporan					
			1 laporan					

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Pendanaan Pembangunan

Formulir 1.c

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
		11. Tersusunnya laporan menghadiri sidang/forum internasional di dalam dan luar negeri 12. Tingkat permasalahan dalam pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri multilateral yang terkait dengan pendanaan pembangunan yang ditindaklanjuti	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	
						70%	100%	

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL									
Unit Kerja Eselon I: Kedepuitan Bidang Pendanaan Pembangunan									
PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2010	2011	2012	2013	2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Kegiatan Perencanaan pembangunan nasional bidang kerjasama pembangunan internasional	Output Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional bidang kerjasama pembangunan internasional	1. Tersusunnya Laporan Kalian Pelaksanaan Kerjasama Internasional 2. Tersusunnya Laporan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Internasional (global, kawasan, KSSST) 3. Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Internasional (global, kawasan, KSSST) 4. Tersusunnya Laporan Kegiatan Koordinasi G-20 5. Tersusunnya Laporan Kegiatan Koordinasi KSSST 6. Terselenggaranya pelatihan tematik dalam rangka KSSST/Piloting KSSST 7. Tersusunnya Laporan Kegiatan <i>Strengthening Innovative Partnership for Development Cooperation</i> 8. Tersusunnya Laporan Kegiatan <i>Capacity Development Project for South-South and Triangular Cooperation</i> 9. Tersusunnya draft Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan KSSST 10. Tersusunnya laporan menghadiri sidang/forum internasional insidental di dalam dan luar negeri dalam Kerjasama Pembangunan Internasional				1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen - 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen - 1 dokumen	Direktorat Kerjasama Pembangunan Internasional

Formulir 1.c

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Kedepuan Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2010	2011	2012	2013	2014		
Kegiatan Evaluasi kinerja pembangunan daerah	Output Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	1. % kesesuaian monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah dengan rencana pembangunan daerah 2. % hasil evaluasi pembangunan daerah terhadap rancangan dokumen lima tahunan (RPJMN) 3. % evaluasi pembangunan daerah terhadap rancangan dokumen tahunan (RKP) 4. % ketepatan waktu penyelesaian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah 5. % kesesuaian muatan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi tematik pembangunan daerah dengan rencana 6. % evaluasi kinerja pembangunan daerah terhadap prioritas pembangunan dalam RPJMN/RKP 7. % daerah yang memiliki dokumen petunjuk pelaksanaan pedoman evaluasi kinerja pembangunan daerah 8. Jumlah dokumen evaluasi di bidang evaluasi kinerja pembangunan daerah tingkat provinsi	-	-	-	-	100%	Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	
			100%	-	100%	100%	100%	100%	
			33 dokumen						

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL								
TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014								
Unit Kerja Eselon I: Kedeputan Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan								
PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
Kegiatan Peneranaan pembangunan nasional bidang evaluasi kinerja pembangunan sektoral	Output Dokumen rancangan rencana pembangunan nasional bidang evaluasi kinerja pembangunan sektoral	1. % hasil evaluasi kinerja pembangunan sektoral terhadap rancangan dokumen lima tahunan (RP-JMN) 2. % hasil evaluasi kinerja pembangunan sektoral terhadap rancangan dokumen tahunan (RKP) 3. % pematanaan pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan sektoral dalam RKP sesuai rencana 4. % hasil evaluasi kinerja pembangunan sektoral terhadap pelaksanaan kebijakan RP-JMN/RKP (evaluasi terahali) 5. % hasil evaluasi kinerja pembangunan sektoral pencapaian RP-JMN (midterm dan final term) 6. % ketepatan waktu penyelesaian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan sektoral 7. Jumlah dokumen pedoman evaluasi pembangunan sektoral	100%	-	-	-	-	Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral
			100%	100%	100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	100%	100%	
			2 dokumen	1 dokumen	-	-	-	

TARGET PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Unit Kerja Eselon I: Inspektorat Utama

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2010	2011	2012	2013	2014	
Kegiatan pengembangan di bidang kinerja kelembagaan	Output Laporan hasil pengembangan di bidang kinerja kelembagaan	1. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan konsultasi 2. % penepatan SAKIP (renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dll) 3. Kecepatan waktu penyelesaian LHP 4. Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan di bidang kinerja kelembagaan	60% - 40% 5 dokumen	65% - 50% 5 dokumen	70% - 60% 5 dokumen	75% - 70% 5 dokumen	80% 100% 80% 5 dokumen	Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ARMIDA S. ALISJAHBANA

ANAK LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PPN /
KEPALA BAPPENAS
NOMOR 4 TAHUN 2014

Formulir 2

KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PROGRAM/KEGIATAN	BASELINE 2009	ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					
		2010	2011	2012	2013	2014	
A. ALOKASI PROGRAM GENERIK	204.713	306.450	504.917	383.900	395.100	401.300	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	69.704	142.867	341.217	345.000	361.000	367.000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	20.309	20.069	160.000 ^{*)}	35.000	30.000	30.000	
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300	
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Bappenas	111.200	140.014	-	-	-	-	
B. ALOKASI PROGRAM TEKNIS	194.547	251.833	265.500	292.000	301.000	298.000	
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL							
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (RPJPN, RPJMN, RKP)	20.099	27.859	23.000	27.000	30.000	23.000	
Kegiatan Pelaksanaan Tugas dari Rekomendasi Kebijakan Pembangunan	53.722	53.650	53.000	54.000	55.000	54.000	
Kegiatan Penyusunan Pendanaan Pembangunan Strategis Sektoral, Lintas Sektor, dan Wilayah	32.288	40.754	45.000	53.000	54.000	55.000	
Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional	6.618	9.690	17.500	17.000	19.000	19.000	

Formulir 2						
KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN UNTUK TAHUN 2010-2014						
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL						
PROGRAM/KEGIATAN	BASELINE 2009	ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)				
		2010	2011	2012	2013	2014
Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional ⁽¹⁾	12.575	23.069 ⁽²⁾	29.000 ⁽³⁾	32.000 ⁽⁴⁾	32.000 ⁽⁵⁾	33.000 ⁽⁶⁾
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan, Pendanaan, Pemantauan, Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional	69.245	96.811	98.000	109.000	111.000	114.000
TOTAL SEMUA PROGRAM	399.260	558.283	770.417	675.900	696.100	699.300

^{*)} Termasuk Rp. 115 miliar untuk pembangunan gedung baru Bappenas

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ARMIDA S. ALISJAHBANA